



Identifikasi dan Penilaian Peluang Mekanisme Pendanaan bagi Ekosistem Hutan dan Konservasi Keragaman Hayati

Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan
Musi Rawas Utara

Maret 2016



IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN PELUANG MEKANISME PENDANAAN BAGI EKOSISTEM HUTAN DAN KONSERVASI KERAGAMAN HAYATI

Di Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin dan Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan



TIM PENULIS

AIDIL FITRI, MA
MANGARA SILALAH, MSc. MT
ADIOSYAFRI, SSi
DEDDY PERMANA, SSi

DIDUKUNG OLEH GIZ BIOCLIME



giz

Palembang, Maret 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

- This study is focusing on identifying and assessing fund opportunities for forest ecosystem and biodiversity in South Sumatra province that involves in 4 types of ecosystem namely; mangrove, peat lands, lowland and upland forest. Those ecosystems is located in 4 different districts; Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas and North Musi Rawas. On top of hat, this study will analyze potential funds sources, mechanism, challenging and prequirements in obtaining funds from either national or international sources.
- There are numerous different types of funds that are related to nonprofit projects as the followings; infrastructures and technology, environment, economy, social, government and policy, education, gender and combinations. In order to get funds from either inside or outside of the country, there are some requirement that need to be fulfilled by applicants such as about understanding of the issues, organizational capacities, vision, mission and goals of the organization, legality and skill of applicants.
- In districts of Musi Rawas and North Musi Rawas, there are some donor agencies, for the last 5 years that has been working in the areas like GIZ, DANIDA, Caritas Australia, The Asia Foundation/ CLUA, UKAID, Norwegian Government, The Ford Foundation, Flora Fauna Indonesia, Australia Zoo and Rufford Foundation. Most of donors work in the areas of climate issues and forest governance. The last three organizations worked in the area conservation especially related to endangered species like Sumatra Tiger. For coming future, some issues that are still necessary to work with are in the area of degradation and deforestation, indigenous rights, community forestry and biodiversity.
- In Musi Banyuasin and Banyuasin districts which are the area that are mostly peat lands, donors mostly are working in the areas of forest fires, biodiversity, restorations and conservation, community rights, poverty reduction and forest governance. Currently, donor that are interested in this districts are ZSL, JICA, DANIDA, GIZ Bioclime, Uni Europa, UNDP, CLUA, UKAID/DFID/The Asia Foundation, USAID, and BMU-KFW.
- This study also assessed stakeholders' capacities in project design and project implementation. The result of the study carried out some necessary issues like; there are many organizations that have yet legality especially letter permit from the ministry of law and human rights. There is a big gap in organizational capacities, especially issues related to project designs, human resources, and access to donor. So, two highlight recommendations of this study is to do capacity building for NGOs and develop a consortium for project implementation.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR SINGKATAN	5
PENDAHULUAN	6
1. Latar Belakang	6
2. Tujuan.....	7
3. Hasil yang diharapkan.....	7
4. Ruang Lingkup Studi.....	8
5. Metode dan Pendekatan	8
PENGERTIAN PENDANAAN HIBAH.....	10
1. Definisi	10
2. Mekanisme Penyaluran Dana oleh Lembaga Donor	12
3. Bidang Cakupan Bantuan Pendanaan.....	12
4. Cara Mengakses Pendanaan.....	13
GAMBARAN LANDSKAP EKOSISTEM DAN PENDANAAN.....	15
DI KABUPATEN PRIORITAS	16
1. Gambaran Singkat Lanskap Ekosistem Prioritas “Bioclime”	16
2. Profil Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Prioritas.....	19
2.1. Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara	19
2.2. Isu Strategis Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.....	20
3. Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin.....	20
3.1. Isu Strategis dan pengelolaan SDA di Kabupaten Musi Banyuasin dan Bayuasin.....	21
4. Identifikasi Pendanaan di Lanskap Prioritas	22
4.1. Musi Rawas dan Musi Rawas Utara	22
5. Pemetaan Kapasitas Stakeholders	23
PELUANG PENDANAAN DALAM BENTUK PINJAMAN	Error! Bookmark not defined.
TANTANGAN Mendapatkan Pendanaan di Lanskap Prioritas	32
BAHAN BACAAN.....	36
LAMPIRAN 1; CONTOH LOGICAL FRAME WORK.....	37
LAMPIRAN 2 : ANALISA STAKEHOLDERS DALAM KEMAMPUAN Mengakses Pendanaan BERKAITAN DENGAN KONSERVASI HUTAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.....	39
LAMPIRAN 3 : CONTOH SWOT	52

DAFTAR SINGKATAN

BMU KFW	: The German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) and KfW Development Bank
CSO	: Civil Society Organization/ Lembaga Swdaya Masyarakat
CLUA	: Climate and Land Use Alliance
CSR	: Corporate Social Responsibility
CV	: Commanditaire Vennontschap atau Persekutuan Komanditer
DANIDA	: Danish International Development Agency
DFID	: Development Foreign International Development
FAO	: Food and Agriculture Organization
GIZ	: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
HaKI	: Hutan Kita Institute
HTI	: Hutan Tanaman Industri
HAM	: Hak Azazi Manusia
HBKT	: Hutan Bernilai Konservasi Tinggi
ICCTF	: Indonesia Climate Change Trust Fund
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
JICA	: Japan International Cooperation Agency
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	: Kesatuan Pemangku Hutan
MURATARA	: Musi Rawas Utara
NGO	: Non-Government Organization
PINUS	: Pilar Nusantara
TAF	: The Asia Foundation
TFCA	: Tropical Forest Conservation Aid
UNDP	: United Nation Development Program
USAID	: United State Aid International Development
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup
WHO	: World Health Organization
ZSL	: Zoological Society of London

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Studi ini berfokus pada identifikasi dan penilaian peluang mekanisme pendanaan hibah bagi ekosistem hutan dan konservasi keragaman hayati di provinsi Sumatera Selatan. Meliputi empat tipe ekosistem yaitu ekosistem mangrove, gambut, hutan dataran rendah dan hutan dataran tinggi atau berbukit. Keempat tipe ekosistem ini berada di empat kabupaten yaitu Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin dan Banyuasin. Berbicara tentang lanskap keempat tipe ekosistem hutan, maka harus diidentifikasi berbagai keterkaitan interaksi yang ada, sumber-sumber pendanaan, visi, strategi, potensi dan permasalahan yang di hadapi dalam proses keberlanjutan ekosistem, ekonomi dan sosial.

Permasalahan, potensi, dan peluang yang ada di lanskap tersebut sebenarnya merepresentasikan persoalan, potensi dan peluang konservasi ekosistem hutan dan keragaman hayati yang ada di Indonesia. Permasalahan utama konservasi hutan dan keragaman hayati di Sumatera Selatan sangat kompleks menyangkut konversi hutan/ lahan, illegal logging, kebakaran hutan, perizinan tumpang tindih izin, konflik lahan dan korupsi.

Melihat berbagai kepentingan terhadap sumber daya hutan dan ekosistemnya di lanskap tersebut, maka banyak stakeholder memiliki interest yang berbeda, perlu diselaraskan agar kesinambungan dan ketahanan ekosistem terjaga. Sementara itu, berbagai inisiatif internasional dan nasional dan tren dari komitmen perusahaan cukup tinggi terhadap konservasi terhadap keempat ekosistem tersebut karena tekanan pasar, untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan ekosistem serta pembangunan hijau.

Beberapa inisiatif misalnya hutan desa, hutan kemasyarakatan, restorasi ekosistem, izin jasa Lingkungan, inisiatif lanskap koridor ekosistem essential, bahkan perusahaan perkebunan dan HTI juga turut memberikan komitmen lingkungan. Khusus untuk hutan desa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan izin Hutan desa lebih dari 50.000 ha, restorasi ekosistem lebih dari 50.000 ha serta perusahaan jasa Lingkungan sekitar 14.000 ha.

Berbagai inisiatif internasional dalam hal mendorong pembangunan ramah Lingkungan dan emisi rendah karbon, seperti misalnya GIZ bekerja sama dengan KLHK di beberapa wilayah, dan secara khusus di Sumatera Selatan dengan program GIZ Bioclimate yang berfokus pada implementasi keragaman hayati, dan perubahan iklim. Proyek Bioclimate ini bertujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Proyek ini menginisiasi mempertahankan hutan-hutan yang bernilai konservasi tinggi menyimpan karbon khususnya di kawasan mangrove dan gambut, dan meningkatkan stok karbon di areal-areal yang masih hutan di empat tipe ekosistem tersebut. Singkatnya, Pemerintah Jerman ingin mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan konsep pembangunan dan konservasi untuk pembangunan emisis rendah karbon dan pembangunan hijau. Diyakini upaya-upaya ini akan memberikan keuntungan ganda bagi target pencapaian "Biodiversity Aichi Targets", ekosistem esensial dan pembangunan ekonomi hijau untuk mendukung pengurangan emisi Gas Rumah Kaca secara nasional dan global.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka dukungan dari stakeholders baik dari masyarakat, perusahaan, pemerintah, LSM serta dukungan internasional sangat dibutuhkan. GIZ Bioclimate

bekerjasama dengan HaKI memiliki komitmen yang tinggi dalam mendorong para pihak agar memahami, bisa berperan dan bertanggung jawab serta meningkatkan kapasitas organisasi dan individunya demi tercapainya goal diatas. Hutan Kita Institute (HaKI) adalah organisasi independen di Sumatera Selatan yang memiliki visi dan komitmen dalam penyelamatan empat tipe ekosistem dengan konsep lanskap sosial-ekologi dengan pendekatan "broaden partnership". HaKI akan berperan sebagai centre of information dan knowledge transformation terkait tujuan dan goal fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan ekologi hutan di Sumatera Selatan maupun di Indonesia.

Berdasarkan informasi dan latar belakang diatas, GIZ Bioclimate dengan dukungan tim HaKI akan menyajikan hasil penilaian peluang mekanisme pendanaan, dan pengembangan kapasitas (training) yang dibutuhkan para pihak dalam mencapai tujuan konservasi dan pembangunan di empat tipe ekosistem tersebut diatas. Selain itu, memberikan rekomendasi desain pendanaan prioritas di keempat tipe ekosistem serta pengembangan kapasitas dan pengembangan jaringan.

2. Tujuan

- Melakukan identifikasi dan menilai sumber-sumber pendanaan nasional dan internasional termasuk CSR dari perusahaan dalam konservasi ekosistem hutan dan konservasi keragaman hayati di empat kabupaten atau empat tipe ekosistem diatas.
- Mendokumentasikan, menganalisa dan menyediakan data dan informasi lokasi proyek potensial berkaitan dengan syarat-syarat mekanisme funding yang diidentifikasi.
- Mendesain dan mengembangkan sebuah aplikasi dan konsep manajemen pendanaan berdasarkan persyaratan yang digunakan sebagai arahan (guideline).
- Menganalisis pengembangan kapasitas terhadap akses mekanisme funding dan merekomendasikan kegiatan pengembangan kapasitasnya yang mencakup stakeholder di empat ekosistem hutan atau empat kabupaten tersebut.

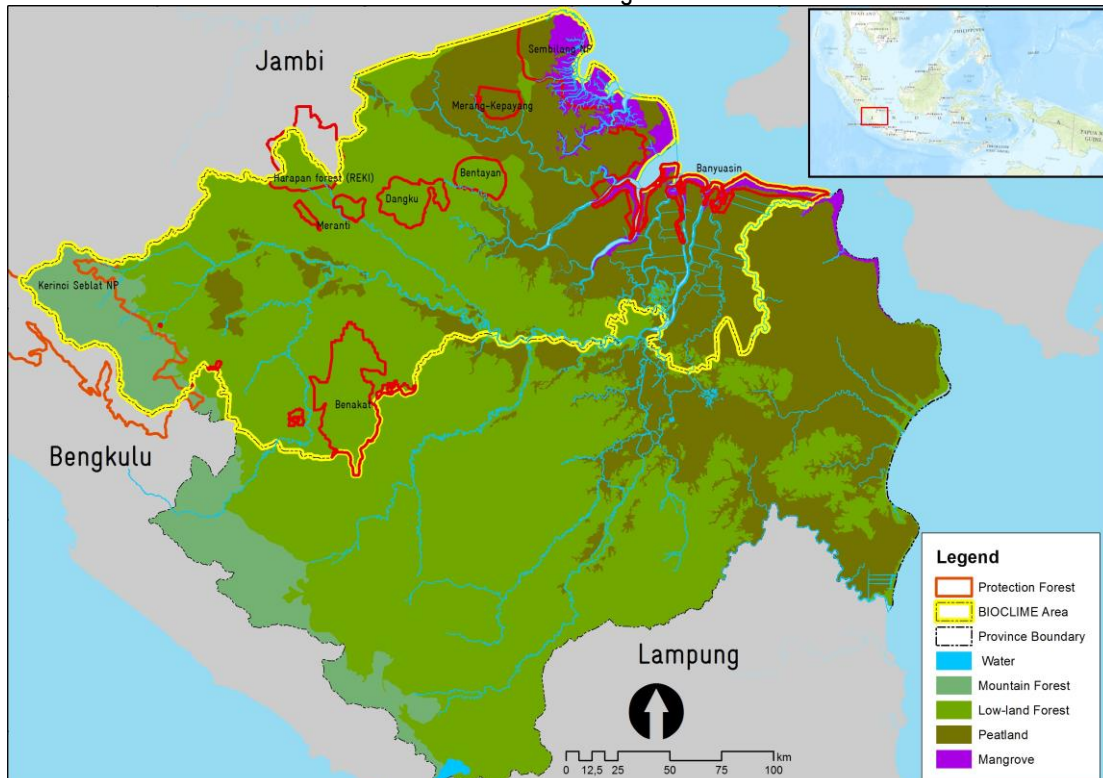
3. Hasil yang diharapkan

- Terdokumentasikannya sumber-sumber dan mekanisme pendanaan hibah maupun CSR yang berkaitan dengan konservasi hutan dan keanekaragaman hayati di empat kabupaten diatas.
- Mendokumentasikan lokasi-lokasi potensial dan analisis stakeholder yang dapat di aplikasikan bagi sumber-sumber pendanaan.
- Konsep pengelolaan dan jaringan kerja pendanaan terbentuk di Provinsi Sumsel untuk melanjutkan kegiatan GIZ.
- Merekomendasikan pengembangan kapasitas bagi stakeholder dalam akses mekanisme pendanaan di atas.
- Adanya organisasi (diproyeksikan HaKI) yang dapat melanjutkan dan memfasilitasi pengembangan proposal dalam bidang konservasi hutan bagi donor terpilih dan juga sebagai pusat informasi di Sumatera Selatan.

4. Ruang Lingkup Studi

Studi ini berfokus pada penilaian peluang mekanisme pendanaan hibah untuk ekosistem hutan dan konservasi keragaman hayati di empat kabupaten yaitu Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Banyuasin. Keempat kabupaten ini merepresentasikan tipe ekosistem hutan yaitu ekosistem mangrove, ekosistem gambut, dataran rendah dan dataran tinggi atau berbukit yang kami sebut "ekosistem Bioclime". Peta studi dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Peta Ekosistem Prioritas "Bioclime" sebagai lokasi studi



Dari peta ekosistem ini, terlihat bahwa ekosistem mangrove terhampar di sepanjang pantai timur Sumatera dengan warna ungu, kemudian ekosistem gambut dengan warna hijau pekat dan ekosistem dataran rendah dengan pewarnaan hijau terang dan ekosistem dataran tinggi dengan warna biru muda.

Studi ini mencakup identifikasi pendanaan dari lokal, nasional dan internasional. Jika di tinjau dari sumbernya maka akan melingkupi pendanaan dari publik internasional, publik nasional, dan private nasional dan lokal. Oleh karena itu, identifikasi peluang pendanaan ini mencakup dana hibah, dana dukungan dari pemerintah, dan dari swasta (berupa Corporate Social Responsibility). Selain itu, studi ini juga akan melakukan penilaian kapasitas organisasi dan individu dalam mengakses jenis-jenis pendanaan tersebut.

5. Metode dan Pendekatan

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data didapatkan dengan berbagai metode dan cara yaitu studi literature, dan interview dan FGD. Studi literature adalah pengumpulan dan analisis informasi yang tersedia di internet, laporan, dokumen, pemberitaan dan informasi sumber-sumber pendanaan baik itu nasional dan internasional. Informasi yang diperlukan

adalah sumber-sumber pendanaan dari nasional dan internasional, termasuk program CSR, kontak person, mekanisme dan lain-lain. Interview dilakukan dengan cara melakukan wawancara para pihak yang mengerti dan paham terkait pendanaan yang meliputi, topik wawancara adalah:

- Apa saja jenis pendanaan yang diketahui di empat landscape tersebut
- Bagaimana kriteria organisasi /perusahaan/ lembaga yang dapat mengakses pendanaan (menyangkut juga personal dan manajemen)
- Bagaimana cara berjejaring dan mengakses pendanaan tersebut
- Strategi dan kapasitas apa yang dibutuhkan dalam mengakses pendanaan tersebut

PENGERTIAN PENDANAAN HIBAH

1. Definisi

Banyak yang memahami bahwa pembiayaan atau pendanaan sebuah organisasi adalah uang semata. Padahal dalam prakteknya, banyak juga lembaga donor yang tidak mau memberikan bantuan pendanaan berupa uang *cash*, tetapi berupa barang atau tenaga ahli, fasilitas penggunaan peralatan, tempat, dan sebagainya. Hal ini penting untuk kita pahami agar ketika kita mencari peluang kerja sama atau bantuan pendanaan, kita tidak terkunci pada bentuk uang namun juga dalam bentuk – bentuk yang disebutkan diatas. Di dalam dunia pendanaan, ada beberapa bentuk bantuan pendanaan yaitu (*Machfudh, 2010*):

- a. Bantuan Program (*Program Aid*). Bantuan ini biasanya diberikan oleh suatu Negara atau lembaga pendanaan internasional ke satu Negara berkaitan dengan satu program pembangunan tertentu. Contohnya adalah bantuan pangan.
- b. Bantuan Proyek (*Project Aid*). Bantuan ini diberikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan berupa, valuta asing atau valuta asing yang dirupiahkan, untuk membiayai berbagai kegiatan proyek pembangunan baik dalam rangka rehabilitasi, pengadaan barang/ peralatan dan jasa, perluasan atau pengembangan proyek baru. Pemberian dana secara langsung, ini bisa dalam bentuk hibah, pinjaman atau investasi (pemberian dana dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu, termasuk penyertaan modal). Bentuk pembiayaan ini umumnya diberikan oleh lembaga pemerintah, lembaga donor, organisasi nirlaba/ nonpemerintah dan lembaga keuangan.
- c. Bantuan Teknis (*Technical Assistance*). Bantuan ini diberikan ke satu proyek tertentu dalam bentuk bantuan penyediaan tenaga ahli (*expert*), pendidikan dan latihan, barang dan peralatan dan atau kegiatan pendukung lainnya. Secara umum, bantuan teknis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Penyediaan perlengkapan fisik, mencakup pemberian secara langsung alat dan bahan untuk menunjang terlaksananya kegiatan pemohon, serta berbagai teknologi yang mendukung. Bentuk pembiayaan ini contohnya bantuan kereta rel listrik yang ada di Jabotabek yang diberikan oleh Kedutaan Besar Jepang kepada pemerintah Indonesia (dalam hal ini Departemen Perhubungan).
 - Pendampingan, termasuk didalamnya fasilitasi, advokasi kebijakan, pembentukan jaringan, kerja sama atau asosiasi. Bentuk pembiayaan ini banyak diberikan oleh lembaga donor dan organisasi nirlaba/ nonpemerintah dalam hal pembentukan organisasi masyarakat, pembuatan atau perbaikan kebijakan, pengembangan jaringan pemasaran hasil industri rumah tangga, dan lainnya. Contohnya adalah bantaun oleh The Asia Foundation (TAF) ke WALHI Sumsel untuk kampanye tata kelola hutan yang baik dan bebas korupsi.
 - Peningkatan kapasitas, yaitu peningkatan kemampuan dan sumber daya individu, organisasi dan komunitas dalam mengatasi perubahan pembangunan, termasuk di dalamnya adalah pembentukan kesadaran, keterampilan, pengetahuan, motivasi, komitmen dan kepercayaan diri. Contoh bentuk pembiayaan ini adalah pelatihan dan beasiswa yang diberikan oleh beberapa lembaga donor dan organisasi nirlaba/ nonpemerintah.

- Pengkajian, dalam bentuk studi atau saran di bidang yang diajukan oleh pemohon. Bentuk pembiayaan ini terutama dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga donor serta beberapa organisasi nirlaba/nonpemerintah.
- d. Bantuan dari pihak swasta yang berupa tanggung jawab sosial dan Lingkungan akibat dari dampak yang ditimbulkan perusahaan biasa disebut Corporate social Responsibility (CSR).

Selanjutnya di Indonesia ada beberapa bentuk bantuan pendanaan yang ada sebagai berikut:

- a. Infaq/ sedekah/ zakat/ hadiah: Merupakan salah satu bentuk bantuan pendanaan bagi seseorang/ kelompok/ organisasi tertentu. Pemberi dana tidak akan meminta pengembalian apapun terhadap bantuan yang telah dikeluarkan, tidak juga laporan pemakaian atau hasil pemakaian dana tersebut. Bantuan dana ini sifatnya pemberian sukarela atau *charity*. Pemberi bantuan dana jenis ini biasanya adalah perorangan.
- b. Hibah murni (*grant*): Bentuk bantuan pendanaan ini adalah suatu bantuan yang tidak mensyaratkan kepada pemohon untuk mengembalikan bantuan yang diberikan apabila kegiatan telah selesai tetapi pemohon cukup menyampaikan laporan hasil kegiatannya. Jadi tidak ada pembayaran balik dari penerima ke pemberi bantuan dana. Hasil kegiatan ini biasanya akan dipakai oleh lembaga donor tersebut sebagai salah satu pencapaian kegiatan lembaga donor. Hibah pada umumnya tidak hanya berbentuk modal/ dana *cash*, tetapi bisa juga tenaga ahli dan manajemen, maupun alih teknologi. Hibah ini dapat berasal dari satu Negara (bilateral) dan dapat juga dari satu lembaga pendanaan regional atau internasional (multilateral) misalnya lembaga-lembaga dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP, FAO, WHO, dan lain-lain). Selain itu ada juga Hibah bersyarat: bentuk-bentuk pendanaan dari pemerintah dan swasta baik itu pusat, provinsi dan daerah dengan persyaratan-persyaratan yang ketat berdasarkan aturan main anggaran.
- c. Pinjaman (*loan*): Sesuai dengan namanya, yakni pinjaman, maka pemberi bantuan dana ini akan meminta kembali dana yang telah diberikan, artinya penerima dana berkewajiban mengembalikan dana yang dia peroleh. Pinjaman sifatnya merupakan bantuan dana dalam jangka waktu tertentu dan penerima bantuan harus membayar kembali pinjaman serta bunganya bila telah jatuh waktunya. Bunga pinjaman ada yang bersifat sangat kecil atau biasa disebut pinjaman lunak (*soft loan*) dan ada juga yang bersifat bunga komersial. Pinjaman bunga lunak biasanya diberikan oleh satu lembaga pemerintah baik itu pemerintah Indonesia maupun pemerintah asing (bantuan luar negeri). Apabila bantuan pinjaman ini berasal dari luar negeri, maka sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari satu Negara (pinjaman bilateral) atau dari satu lembaga keuangan regional atau internasional (pinjaman multilateral) seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan lain-lainnya. Selain pinjaman dari pemerintah atau lembaga keuangan regional/ internasional, lembaga keuangan swasta pun dapat memberikan pinjaman dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.
- d. CSR adalah bentuk pendanaan dimana program-program disyaratkan dapat memberikan dampak positif bagi pemberi dana (swasta).

2. Mekanisme Penyaluran Dana oleh Lembaga Donor

Begitu kita mendapat persetujuan pembiayaan dari lembaga donor, maka ada beberapa model para donor menyalurkan dananya ke penerima/ pengaju proposal, antara lain (Machfud, 2010):

- Donor akan memberikan dana cash langsung ke pemohon. Model ini seperti ini jarang terjadi, terkecuali donornya berasal dari individu.
- Donor akan mentransfer dananya ke rekening pemohon. Berkaitan dengan rekening pemohon ini, ada dua macam yaitu rekening atas nama pemohon/ Ornop/ LSM atau rekening atas nama proyek. Kebijakan jenis rekening ini ditentukan oleh lembaga donor.
- Donor memberikan bantuannya dalam bentuk materi yang diperlukan oleh pemohon, bukan dalam bentuk uang cash. Pemohon memberikan daftar rencana pengeluaran anggarannya dan donor akan membayar langsung ke pihak penagih/ pedagang/ took/ vendor. Pemohon tidak menerima satu senpun uang cash.

Selain itu, ada mekanisme pendanaan oleh swasta yaitu CSR di mana proses-proses hampir mirip dengan cara-cara dan mekanisme lembaga donor dan berdasarkan aturan main yang dibuat masing-masing perusahaan. Biasanya si penerima program harus memiliki badan hukum yang jelas misal yayasan atau CV, lembaga riset perguruan tinggi, dan lain-lain.

3. Bidang Cakupan Bantuan Pendanaan

Berikut adalah beberapa bidang cakupan pembiayaan yang memiliki atau berpotensi terkait dengan berbagai program-program nirlaba:

- Infrastruktur dan teknologi, yaitu pembangunan fisik serta penyediaan, pembuatan dan penelitian mengenai teknologi pendukung. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya bisa ikut membantu pembiayaan dalam penyediaan dana instalasi fasilitas umum misalnya pembangkit listrik, instalasi air minum untuk masyarakat, penyediaan teknologi tepat guna pendukung usaha produktif, dan lainnya.
- Lingkungan hidup, yaitu berbagai upaya untuk menjaga kelestarian alam, serta memberikan penyadaran serta pendidikan kepada masyarakat mengenai manajemen sumber daya alam. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan misalnya tentang penjagaan daerah tangkapan air, penyadaran masyarakat untuk beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan, dan lain-lainnya.
- Ekonomi, yaitu segala kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan modal, menciptakan mata pencarian dan meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk juga penyediaan layanan finansial. Sumber pembiayaan di bidang ini dapat membantu program-program yang terkait untuk penyediaan modal, penyiapan dan pengelolaan usaha produktif; pembukaan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan; dan lainnya.
- Sosial, yaitu segala hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat, gejala dan perilakunya. Contohnya adalah pembangunan instalasi listrik di daerah-daerah tertinggal dalam rangka pengentasan kemiskinan, pendampingan masyarakat dalam menyerap teknologi tepat guna, fasilitasi pembentukan organisasi pengelola listrik di masyarakat, pembentukan dan penguatan jaringan masyarakat dan pengusaha, dan lainnya.
- Pemerintahan dan kebijakan, yaitu berbagai upaya advokasi dan penyusunan peraturan serta anggaran negara (tingkat pusat dan lokal) yang dapat mewakili

kebutuhan pengembangan sektor tertentu misalnya sektor energi yang ramah lingkungan. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan untuk membantu penyediaan kebijakan yang mendukung di suatu daerah, pengalokasian dana pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan oleh pemerintah, penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan studi kelayakan, dan lainnya.

- Pendidikan, yaitu memberikan bantuan pendidikan formal atau informal, baik kepada masyarakat, organisasi atau individu, termasuk di dalamnya beasiswa dan pelatihan. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan oleh individu-individu untuk mendapatkan pendidikan khusus mengenai teknologi tepat guna tertentu, atau dimanfaatkan oleh kelompok untuk pelatihan operator teknologi tepat guna tersebut, dan lain-lainnya.
- Gender, yaitu memastikan adanya kesetaraan antara peran laki-laki dengan perempuan dalam segala aspek. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan pelaksanaan suatu program pembangunan di suatu daerah yang mengedepankan keseimbangan gender.
- Kombinasi ; sekarang ini ada banyak organisasi yang mengkombinasikan atau mensinergikan dari cakupan-cakupan pendanaan yang disebutkan diatas, terutama untuk NGO sosial dan lingkungan hidup yang sering mengkombinasikan antara kegiatan ekonomi, pendidikan dan perlindungan atau konservasi lingkungan hidup.

4. Cara Mengakses Pendanaan

Untuk mendapatkan bantuan dari lembaga pendanaan, tidaklah langsung namun ada beberapa hal yang perlu dipahami dan dilengkapi oleh lembaga pemohon yaitu ;

- Pahami isu yang akan kita usulkan ke lembaga donor, kemudian formulasikan isu tersebut kedalam kerangka penyelesaian masalah dan intervensi yang diperlukan untuk membuat perubahan yang dimaksud. Ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis teori of change dari isu yang kita tangani.
- Pelajari dengan detil potensi donor yang cocok dengan isu yang akan kita tangani; persyaratan, kriteria, durasi, wilayah cakupan dan bentuk dukungan.
- Kesiapan organisasi. Pastikan bahwa organisasi kita siap atau punya kapasitas yang baik untuk melaksanakan program tersebut. Jika tidak, dapat membentuk konsorsium dengan organisasi lain, sehingga dapat saling melengkapi dan menguatkan.
- Buatlah proposal yang sesuai dengan kriteria donor dan sesuai dengan kapasitas organisasi kita. Misal, kalau organisasi kita biasa mengelola dalam satu tahun satu miliar rupiah, maka jangan mengajukan pengelolaan jauh melebihi dari kapasitas organisasi, misal menjadi 3 miliar rupiah.

- Pastikan bahwa seluruh kelengkapan legalitas dan administrasi organisasi anda sudah memenuhi standar misal SK Menkumham, Notaris, audit publik tahunan, dan Surat Kesbangpol.
- Proposal juga harus dilengkapi dengan beberapa komponen seperti logical frame work (LFA), analisa peran para pihak, analisa resiko, analisa masalah, analisa SWOT, dan sistem monitoring dan evaluasi. Berikut adalah alur umum pembuatan dan pengajuan proposal.

ALUR PENGAJUAN DAN PEMBUATAN PROPOSAL

KRITERIA DASAR ORGANISASI PENGAJU

1. Sumber daya manusia (Pengawas, Penanggungjawab proyek, Pengelola Keuangan, Pelaksana Lapangan)
2. Legalitas organisasi (Akta notaris, SK Menkum HAM, Surat Kesbangpol).
3. Pengalaman Pengelolaan proyek, termasuk sumber dana dalam 3 tahun terakhir.

KONTEK PROYEK

1. Gambaran lokasi (Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan).
2. Relevansi (Kesesuaian proyek dengan visi/tujuan penyedia dana, kebijakan pemerintah lokal dan nasional, dan konteks internasional).
3. Dampak proyek (Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan).

KERANGKA LOGIS

1. Analisis pemangku kepentingan (Stakeholder analisis)
2. Analisis SWOT
3. Analisis masalah
4. Deskripsi tujuan (Umum/Goals dan Khusus/objektif)

DESKRIPSI INTERVENSI PROYEK

1. Komponen proyek, keluaran, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Metode dan pendekatan pelaksanaan
3. Rencana kerja / workplan
4. Anggaran
5. Asumsi dan resiko

PELAKSANAAN PROYEK

1. Struktur pelaksana
2. Mekanisme pelibatan para pihak
3. Pelaporan, review, monitoring dan evaluasi
4. Rencana pemantauan kinerja

PENGAJUAN

GAMBARAN LANDSKAP EKOSISTEM DAN PENDANAAN DI KABUPATEN PRIORITAS

1. Gambaran Singkat Lanskap Ekosistem Prioritas "Bioclime"

Tipe ekosistem

Landskap ekosistem prioritas ini terdiri dari empat tipe ekosistem meliputi ekosistem mangrove, lahan basah/ gambut, dataran rendah dan dataran tinggi. Hamparan ekosistem ini berada di bagian Utara Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Bengkulu. Ke empat tipe ekosistem terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Lanskap prioritas tersebut yang juga kami sebut "ekosistem bioclime" merepresentasikan empat tipe ekosistem di Sumatera Selatan yang mencakup daerah penting untuk hutan bernilai konservasi tinggi (HBKT) seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Lanskap Prioritas

No	Tipe ekosistem	Nama Areal HBKT	Kabupaten
1	Mangrove	Hutan Lindung Pantai	Banyuasin
		TN Sembilang (45 %)	Banyuasin, Muba
2	Gambut	Hutan Desa Muara Merang	Musi Banyasin
		TN Sembilang (42 %)	Banyuasin, Muba
		HRG Merang Kepahiang	Musi Banyasin
		HP Merangsang Mendis	Musi Banyasin
		HL Banyuasin	Banyuasing
3	Dataran rendah	SM. Bentayan	Musi Banyasin
		HKm Bukit Cogong	Musi Rawas
		Hutan Harapan	Musi Banyuasin
		SM Dangku	Musi Banyuasin
		SM Bentayan	Musi Banyuasin
		KPH Lakitan	Musi Rawas Utara
4	Dataran tinggi (perbukitan)	TNKS dan bufferzone	Musi Rawas

Keanekaragaman hayati

Keanekaragaman hayati di lanskap ekosistem prioritas ini sangat kaya dan merepresentasikan keanekaragaman hayati di Sumatera. Terdapat juga hotspots biodiversity di kantung-kantung kawasan hutan yang cenderung akan terfragmentasi (gambar 2). Keanekaragaman hayati di lanskap ekosistem mangrove dan lahan basah/ gambut ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yang direpresentasikan oleh Kehati di TN Sembilang. Kawasan TN Sembilang merupakan habitat bagi sejumlah spesies penting/ terancam seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Macan Dahan (*Neofelis nebulosa*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Lumba-lumba tanpa sirip punggung (*Neophocaena phocaenoides*), Buaya Muara (*Crocodylus porosus*), Kucing Mangrove, Kucing Emas dan berbagai spesies penting lainnya. Sedikitnya 112 spesies burung ditemukan di daerah mangrove Sembilang, termasuk spesies yang

status populasinya rentan (vulnerable) di dunia seperti Bangau Bluwok (*Mycteria cinerea*), dan tempat singgah burung migran. Dari total burung tersebut, terdapat 44 spesies menggunakan mangrove sebagai habitat utama mereka, sementara 22 spesies yang terikat dengan kawasan ini. Jumlah ini lebih besar daripada hutan mangrove lainnya di dunia (Balai TN Sembilang; bahan presentasi zonasi, tanpa tahun).

Sementara itu di ekosistem hutan dataran rendah juga sangat kaya dan merupakan tempat flagship spesies khususnya gajah sumatera. Hal ini dapat dilihat dari kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di Hutan Harapan dimana terdapat 307 spesies burung atau 49% dari jenis burung sumatera, 64 jenis spesies dari 194 mamalia dimana terdapat harimau sumatera, gajah sumatera dan tapir melayu. 728 jenis spesies tumbuhan dari 820 jenis tumbuhan di Sumatera, 71 spesies reptile dan 123 jenis ikan air tawar. Dari semua spesies tersebut terdapat 37 spesies terancam punah dan 80 mendekati terancam punah berdasarkan redlist IUCN (Silalahi and Walsh, 2015). Kawasan hutan dataran rendah lainnya seperti SM Dangku dan Bentayan juga memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, namun saat ini terfragmentasi.

Pada tipe ekosistem perbukitan atau dataran tinggi, keanekaragaman hayatinya juga tidak kalah penting. Dengan representasi TNKS yang ada di Kabupaten Musi Rawas, Ekosistem dataran tinggi ini memiliki keanekaragaman hayati yang cukup kaya. Menurut data Balitbangda Jambi (2009), TNKS mempunyai 4.000 macam flora, beberapa diantaranya flora langka dan endemik seperti Pinus Kerinci (*Pinus merkusii* strain Kerinci), Kayu Pacat (*Harpulia alborera*), Bunga Rafflesia (*Rafflesia arnoldi*) dan Bunga Bangkai (*Amorphophallus titanium* dan *A. decussilvae*). Terdapat 37 jenis mamalia, 139 jenis burung, 10 jenis reptil, 6 jenis ampibi dan 6 jenis primata. Kawasan ini juga menjadi habitat endemik beberapa jenis satwa langka yang dilindungi yang menjadi flegship spesies di ekosistem kawasan TNKS yaitu Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*), Gajah Sumatera (*Elephans Sumatrensis*), Harimau Sumatera (*Phantera Tigris Sumatrensis*) dan Tapir (*Tapirus Indicus*) (http://warsi.or.id/projects/tfca_ind.php).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Saat ini pemerintah Indonesia membentuk KPH sebagai unit terkecil yang akan mengelola tapak kawasan-kawasan hutan tersisa. Hal ini didasari atas selama ini tidak ada unit pemerintah yang bekerja di tingkat tapak sehingga degradasi dan deforestasi hutan cukup tinggi yang mengakibatkan pengurangan tutupan hutan secara signifikan setiap tahun. Kebijakan tersebut disambut cepat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten yang ada di Sumatera Selatan khususnya di landscape prioritas. Di ekosistem prioritas "bioclimate" ini terdapat beberapa KPH yang mengelola hutan-hutan tersisa dan diharapkan dapat membantu pemegang konsesi dan perusahaan lain agar kegiatan pengelolaan hutan dapat terintegrasi. Beberapa KPH di wilayah landscape ini adalah KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Lalan, Meranti, Lakitan, Rawan dan Bukit Benakat, Bukit Cogong serta satu KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Banyuasin. Keberadaan dan lokasi-lokasi KPH tersebut dapat dilihat pada gambar 2 di bawah. Keberadaan KPH-KPH ini dinilai sangat penting untuk mempertahankan sisa hutan di sekitar kawasan hutan bernilai tinggi atau sebagai sabuk HBKT dan juga koridor hutan yang menyambungkan kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi sehingga keberadaan keanekaragaman hayati dapat dipertahankan.

Kondisi sosial ekonomi

Di dalam lanskap ini juga terdapat masyarakat adat dan lokal seperti Batin Sembilan, Orang Rimba, Melayu Palembang dan Jambi yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam, hutan dan lahan. Selain itu, terdapat juga migran yang berasal dari berbagai suku dan berasal dari berbagai provinsi di Sumatera dan Jawa untuk melakukan aktifitas pertanian dan pengembangan perkebunan skala kecil. Inisiatif-inisiatif masyarakat juga terdapat seperti HD di Muara Merang, HD di Bukit Cogong dan usulan-usulan baru terhadap pengelolaan berbasis masyarakat (hutan adat) mulai bermunculan.

Pertumbuhan penduduk khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas cukup tinggi hingga 5% per tahun (Yazid, dkk, 2014). Dengan pertumbuhan pendudukan yang tinggi ini yang terutama disebabkan kedatangan migran akan memberikan tekanan yang tinggi terhadap hutan dan lahan dan kawasan-kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi.

Selain tekanan penduduk, kecenderungan konversi juga cukup tinggi oleh perusahaan. Di lanskap ini terdapat berbagai konsesi dan aktifitas perusahaan di berbagai bidang seperti di bidang perkebunan kelapa sawit diantaranya PT Hindoli, PT Gudang Garam, PT Lonsum, Grup Sampoerna. Di bidang perusahaan HTI: Diantaranya Grup Sinarmas, PT Sentosa Bahagia Bersama, PT Pakerin dan lain-lain. Kemudian di bidang perusahaan tambang terdapat: PT Conoco Philips, Grup Atlas Resources. Terakhir ada juga perusahaan karet: diantaranya PT Agro Rawas Ulu dan Bumi Sriwijaya Sejahtera dan perusahaan Restorasi Ekosistem PT REKI di Hutan Harapan. Keberadaan perubahan-perubahan ini tentunya memberikan tekanan terhadap konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati seiring dengan terbukanya akses dan kedatangan migran.

Kondisi Tata Guna Lahan

Berdasarkan data dan informasi di atas, maka landuse di lanskap ini sangat beragam dari penggunaan untuk areal konservasi, areal HP untuk HTI dan RE, inisiatif masyarakat dalam bentuk Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, areal penggunaan lain, areal konversi dan pertambangan, serta penggunaan oleh masyarakat serta untuk pembangunan dan infrastruktur oleh pemerintah.

Dengan berbagai kepentingan tersebut, maka lanskap ekosistem prioritas ini harus di kelola secara bijak dan komprehensif agar dapat berkelanjutan. Jika pengelolaan dan pengaturan tata ruang tidak bijak dan kurang baik maka nilai ekonomi, ekologi dan sosial lanskap ini akan menurun tajam yang berdampak pada kerugian bagi pembangunan regional di kabupaten-kabupaten dan kesejahteraan masyarakat serta keberadaan kekayaan keanekaragaman hayati di atas. Melihat kondisi yang lokasinya juga didominasi oleh gambut, tinggi akan keanekaragaman hayati, berbagai kepentingan, maka pembangunan di lanskap prioritas ini harus mengacu pada pembangunan rendah emisi agar kesinambungan, ketahanan ekosistem dan kehidupan dapat terjaga. Untuk pembangunan rendah emisi ini, GIZ mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk penyelamatan lanskap dan biodiversity serta mempertahankan bahkan meningkatkan cadangan karbon yang ada. Peta landuse dan penggunaan hutan dan lahan di lanskap ini dapat terlihat pada gambar 3.

2. Profil Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Prioritas

2.1. Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan Bagian Barat yang berfungsi sebagai lumbung pangan, pengembangan sektor perkebunan, pengembangan sektor energi dan sebagai daerah penyangga Provinsi Sumatera Selatan karena di wilayah ini terdapat Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) (gambar 3). Luas Wilayah Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan adalah 1.236.582,66 ha, tempat bertemunya hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Secara geografis, dan terletak pada posisi 102°07'00" - 103°40'00" BT dan 2°20'00" - 3°38'00" LS. Letak Kabupaten Musi Rawas sangat strategis karena di lalui jalur lintas tengah Sumatera, yaitu jalur darat yang menghubungkan Bakaheuni di Lampung dan Banda Aceh, serta jalan lintas antar Provinsi yang menghubungkan Kota Palembang dengan Bengkulu, baik melalui Sekayu maupun Lahat. Dengan letak geografis seperti ini menyebabkan Kabupaten Musi Rawas menjadi tempat tumbuhnya sentra-sentra perekonomian terutama di kota-kota kecamatan yang berada di sisi jalan utama lintas Sumatera. Secara administratif Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 17 kecamatan, 19 kelurahan, 242 desa. Batas-batas Wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Kota Lubuklinggau
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim

Murataru adalah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Selatan. Geografi Murataru meliputi tujuh kecamatan dan 83 desa. Sungai Rawas adalah sungai terbesar di kabupaten itu yang membentang dari Ulu Rawas sampai ke Muara Rawas terhubung dengan laut Sungai Musi. Diketahui, setengah dari luas keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan suaka alam, hutan lindung dan hutan pengelolaan sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk pemukiman penduduk dan industri.

Potensi kekayaan tambang yang dimiliki kabupaten Musi Rawas Utara adalah batubara, minyak dan gas bumi serta emas. Potensi lain yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara antara lain pertanian, perikanan, perkebunan dan agro industri. Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan pemekaran dari kabupaten induk Musi Rawas yakni tujuh kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapo, Karang Jaya dan Ulu Rawas. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki luas wilayah keseluruhan 6.008,55 KM² dengan jumlah penduduk 195.689 jiwa.

2.2. Isu Strategis Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara

- Salah satu masalah yang disebutkan dalam RPJMD Tahun 2010 - 2015 adalah terjadinya penurunan luasan dan kualitas hutan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan atau alih fungsi dari fungsi lindung ke kawasan budidaya lainnya. Menurut data Hutan Kita Institute 2015 (HaKI, 2015), tingkat deforestasi di kabupaten ini (termasuk Pali dan Muratara) mencapai angka 11.737 Ha pertahun. Ini merupakan 5 terbesar di Sumatera Selatan. Isu pengelolaan sumber daya alam di Mura juga merupakan isu serius, dimana penguasaan oleh masyarakat sangat sedikit dibanding dengan penguasaan oleh perkebunan besar atau Hutan Tanaman Industri. Tercatat, pengelolaan hutan oleh masyarakat baru mencapai 9.700 hektar berupa Hutan Desa, sementara pengelolaan oleh HTI seluas 77.000 hektar, dan pengelolaan oleh perkebunan besar sawit seluas 223.000 hektar.
- Masih tingginya angka kemiskinan di Musi Rawas, indeks kemiskinan di Musi Rawas mencapai tertinggi ketiga di Sumsel dengan 17,85 % tingkat kemiskinan berdasarkan data BPS 2013 atau sekitar 90.800 jiwa.

3. Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin

Kabupaten **Musi Banyuasin** memiliki luas wilayah administrasi \pm 14.295,96 km² atau \pm 1.426.596 ha. Dari luasan tersebut \pm 50,3 % merupakan kawasan hutan, yaitu Hutan Konservasi 49.793 ha, Hutan Lindung 19.229 ha, HP Terbatas 98.897 ha, HP Tetap 418.177 ha, HP Konversi 127.585 ha (Dishut Muba 2013). Dari total luas kawasan hutan tersebut diatas lebih dari 90 % merupakan kawasan Hutan Produksi (HP) dengan kondisi pemanfaatan saat ini sebagai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), IUPHHK-HA, IUPHHK-HD, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPHHK) Migas dan Ekplorasi Batubara dan sebagian kecil merupakan Areal Tertentu yang belum dibebani izin (free area).

Selama ini potensi kawasan hutan yang sangat luas ini belum dikelola secara baik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek kepentingan, melainkan lebih mengedepankan pertimbangan ekonomis sehingga berimplikasi pada deforestasi dan degradasi dengan laju yang cukup tinggi, yaitu mencapai 49.468 ha/tahun dari total kawasan hutan (HaKI, 2015). Degradasi dan deforestasi yang terjadi diakibatkan oleh konversi lahan untuk HTI, illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan. Kondisi ini juga berbanding lurus dengan kondisi kemiskinan bagi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan itu sendiri. Selain itu, Musi Banyuasin juga banyak terjadi kasus tumpang tindih izin yaitu antara IUPHHK dengan HGU sebesar 7.662 ha dan dengan kawasan lindung dan fungsi kawasan lainnya sebesar 36.072 Hektar, secara detil dapat dilihat dalam peta dibawah ini. Angka kemiskinan pada tahun 2013, menurut BPS adalah 18.02% dari total populasi sebesar 592.400 Jiwa (BPS 2014) atau sekitar 106.632 Jiwa.

Sedangkan **Kabupaten Banyuasin** merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, yang secara Geografis terletak pada posisi antara 1,30° - 4,0° Lintang Selatan dan 104° 00' - 105° 35' Bujur Timur yang terbentang mulai dari bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bagian Timur dengan total luas wilayah seluruhnya mencapai \pm 1, 2 Juta ha.

Letak Geografis Kabupaten Banyuasin yang demikian menempatkan Kabupaten Banyuasin pada posisi potensial dan strategis dalam hal perdagangan dan industri, maupun pertumbuhan sektor-sektor pertumbuhan baru. Kondisi dan posisi Kabupaten Banyuasin dengan ibukota Pangkalan Balai terletak di Jalur Lintas Timur. Selain itu Kabupaten Banyuasin merupakan daerah penyelenggara pertumbuhan Kota Palembang terutama untuk sektor industri. Di sisi lain bila dikaitkan dengan rencana Kawasan Industri dan pelabuhan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin sangat besar peranannya bagi kabupaten di sekitarnya sebagai pusat industri hilir, jasa distribusi produk sumber daya alam baik pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, seerta pertambangan.

Secara administratif, Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Selat Bangka.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kecamatan Sungai Rotan dan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lilin, Sungai Lais dan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin.

Sampai dengan tahun 2013 kabupaten Banyuasin terbagi menjadi 19 kecamatan yang terdiri dari 288 desa dan 16 kelurahan, dengan total jumlah penduduknya mencapai 785.624 orang dan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 1,5% pertahun. Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di kabupaten Banyuasin mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 13,72% menjadi 11,27% pada tahun 2012.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 866 tahun 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan provinsi Sumatera Selatan, bahwa wilayah kabupaten Banyuasin memiliki luasan kawasan hutan mencapai ± 445.750 ha (37% dari total luas wilayah), bukan kawasan hutan atau APL mencapai ± 749.800 ha (62% dari total luas wilayah) dan tubuh air yang luasnya ± 6.550 ha (1% dari total luas wilayah). Khusus kawasan hutan yang ada di kabupaten Banyuasin sebagian besar atau 48% dari total kawasan hutannya (± 217.820 ha) adalah Taman Nasional Sembilang (TNS), 14% (63.900 ha) adalah Hutan Lindung (HL), 20% (89.805 ha) adalah Hutan Produksi (HP) & Hutan Produksi Konversi (HPK), dan 16% (74.225 ha) adalah Suaka Margasatwa (SM).

3.1. Isu Strategis dan pengelolaan SDA di Kabupaten Musi Banyuasin dan Bayuasin

Pengelolaan sumber daya hutan/ lahan di kabupaten Banyuasin sampai dengan tahun 2014, telah ada izin pemanfaatan hutan (Hutan Tanaman) seluas ± 52.000 ha, dan juga terdapat izin usaha perkebunan (IUP) yang luasnya mencapai ± 295.000 ha. Disamping itu telah diidentifikasi kondisi tutupan lahan (landcover) tahun 2014 dari luas total wilayah kabupaten Banyuasin (*sumber: interpretasi citra landsat, ICRAF tahun 2014*) adalah;

- Monokultur sawit, karet, dan kelapa yang luasnya mencapai ± 445.000 ha (40%)
- Hutan rawa, rawa gambut, dan mangrove sekunder yang luasnya mencapai ± 263.000 Ha (23%)
- Hutan rawa, rawa rambut & mangrove primer yang luasnya ± 147.450 ha (13%)
- Semak Belukar, rerumputan dan lahan terbuka yang luasnya ± 126.500 ha (11%)
- Padi sawah dan tanaman semusim yang luasnya ± 77.650 ha (7%)
- Tanaman akasia yang luasnya mencapai ± 33.550 Ha (3%)
- Pemukiman dan tambak yang luasnya mencapai ± 32.250 ha (3%).

Dalam aspek kejadian pengurangan tutupan hutan (deforestasi) di kabupaten Banyuasin dari tahun 2009 s.d tahun 2014 mencapai \pm 25.096 ha atau laju terjadinya deforestasi mencapai \pm 5.019 ha pertahun (sumber: Dijitasi citra landsat, FWI& HaKI, 2014). Kondisi ini telah juga diperparah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 di kabupaten Banyuasin yang luasannya mencapai 135.292 ha (16% dari jumlah total luasan kebakaran provinsi Sumsel) dan kejadian kebakaran tersebut 30% berada di lahan gambut (sumber: Dijitasi citra landsat, HaKI, 2015).

Implikasi-implikasi di atas, juga disebabkan oleh masih buruknya penataan dan pengelolaan (tata kelola) sumber daya hutan/ lahan di kabupaten Banyuasin. Salah satu bentuknya adalah masih banyaknya izin usaha perkebunan (IUP) yang tumpang tindih (overlapping) dengan kawasan hutan yaitu mencapai luasan \pm 16.289 ha (Sumber: dijitasi citra landsat, HaKI, 2014)

4. Identifikasi Pendanaan di Lanskap Prioritas

4.1. Musi Rawas dan Musi Rawas Utara

Dalam 5 tahun terakhir ada beberapa lembaga donor yang melakukan kegiatan terkait sumber daya alam di dua kabupaten ini yaitu GIZ and DANIDA, Caritas Australia, The Asia Foundation dan The Ford Foundation. GIZ and DANIDA melakukan kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan membuat model pendekatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan penguatan kesiap-siagaan pemerintah dan swasta dalam menghadapi perubahan iklim. Caritas Australia, memberikan support kepada Yayasan Wahana Bumi Hijau pada tahun 2012-2013 untuk pengembangan ekonomi masyarakat adat tertinggal di Musi Rawas. Kedua organisasi terakhir melakukan kegiatan dalam bidang forest governance, yang bekerjasama dengan Yayasan Wahana Bumi Hijau dan Pilar Nusantara (PINUS). The Ford Foundation mengkhususkan pada kegiatan perhutanan sosial, yaitu terkait Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan. The Asia Foundation, pada tahun 2014-2015 melakukan penguatan pemerintah dan masyarakat dalam bidang tata kelola hutan melalui isu transparansi dan inisiasi perubahan kebijakan kehutanan di tingkat daerah. Ada juga Flora Fauna Internasional yang bekerja untuk konservasi harimau di TNKS yang mendapat dukungan dari Rufford Foundation, pemerintah Norwegia dan Australia zoo.

Ke depan, melihat dari dua isu sumber daya alam yang sangat serius terutama isu deforestasi dan degradasi di Musi Rawas dan MURATARA dan posisi kedua kabupaten sangat penting bagi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), beberapa program yang penting untuk dilaksanakan kedepan adalah terkait penurunan degradasi dan deforestasi, pengentasan kemiskinan dan penyelamatan lanskap TNKS. Beberapa potensi pendanaan nasional/ internasional yang cocok dengan isu MURA dan MURATARA adalah DANIDA untuk isu terkait perubahan iklim, DFID terkait isu forest governance dan USAID melalui TFCA-KEHATI dan Ford Foundation/ CLUA untuk program biodiversity, community forestry dan indigenous rights. Namun, beberapa sumber dana dengan skema small grant juga dimungkinkan untuk memfasilitasi kegiatan di dua kabupaten ini. Sebagaimana diuraikan dalam table 2 di bawah ini.

Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin adalah daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah gambut, dimana gambut merupakan kawasan yang dapat menyimpan karbon yang tinggi. Kandungan karbon di lahan gambut perhektarnya bervariasi tergantung dari tingkat ketebalannya. Namun secara rata-rata, Page dkk.(2002) memperkirakan besarnya simpanan karbon di lahan gambut sebesar 600 t C ha⁻¹m⁻¹. Hutan gambut di Musi Banyuasin dan Banyuasin juga merupakan hutan gambut tersisa di Propinsi Sumatera Selatan dan merupakan kawasan penting bagi habitat yang hampir punah seperti Buaya Senyulong dan Harimau Sumatera. Karena itulah kemudian banyak donor-donor yang menaruh perhatian ke kabupaten ini seperti ZSL, JICA, DANIDA, GIZ Bioclimate, Uni Eropa, UNDP, DFID/The Asia Foundation, USAID dan BMU-KFW. Sebagian besar dari donor tersebut mendukung kegiatan terkait forest governance, community rights, Biodiversity, Pencegahan Forest Fires dan Peningkatan Kemiskinan masyarakat sekitar hutan.

Beberapa organisasi lokal seperti WALHI, HaKI, Lingkar Hijau, Lembaga Bantuan Hukum Palembang dan Pilar Nusantara sudah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga pemberi dana hibah tersebut, namun nilainya masih relative kecil yaitu di bawah 1 miliar rupiah per tahun. Hanya lembaga-lembaga internasional yang selama ini mampu mengakses dana besar. Padahal ada banyak kegiatan yang penting dilakukan untuk mendukung masyarakat dan pemerintah dalam isu-isu sumber daya alam, dan membutuhkan dana lebih besar. Sekarang ini, proyek dengan dana relatif besar, masih dilakukan langsung oleh lembaga-lembaga pemberi dana sendiri seperti GIZ dan Uni Eropa. Detil dapat dilihat dalam tabel.

Kondisi ini sebenarnya sebuah peluang bagi stakeholder di Sumsel, tentunya dengan berbagai kapasitas yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di samping itu, strategi pengelolaan project juga masih banyak perlu peningkatan di sana sini.

5. Pemetaan Kapasitas Stakeholders

Pemetaan yang dilakukan adalah terkait pemahaman terhadap isu sumber daya alam, pemahaman terhadap akses pendanaan, kapasitas dalam pembuatan proposal, networking dan kelengkapan organisasi. Detil dari pemetaan dilampirkan dalam laporan ini, dan secara umum hasil pemetaan adalah sebagai berikut ;

1. Untuk pemerintah dan sebagian kecil NGO, sudah memahami isu-isu lingkungan di Sumsel terutama isu degradasi, deforestasi, dan kebakaran hutan/ lahan.
2. Semua NGO hanya mengetahui saja ada potensi lembaga-lembaga donor, namun cara/ strategi mengaksesnya perlu ada pelatihannya.
3. Sebagian kecil NGO, terutama yang ada di Kota Palembang sudah memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan pengembangan LFA, namun perlu ada penguatan kapasitas dalam hal proses & strategi kerja sama dengan donor bagi lembaga Pemerintah.
4. Secara keseluruhan, belum memahami cara menulis proposal dengan baik, terutama NGO di kabupaten, sehingga perlu pelatihan teknik penulisan proposal secara keseluruhan.
5. Banyak NGO yang belum memenuhi standar legalitas sebuah organisasi seperti akte notaris, SK Menkumham, dan surat Kesbangpol.

Tabel hasil analisa stakeholder di 4 kabupaten terlampir dalam tabel (lampiran)

**Peluang Pendanaan Nasional dan Internasional
Untuk Ekosistem Hutan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Sumatera Selatan
(Kabupaten Prioritas : Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara)**

Sumber Pendanaan	Fokus dan Isu Utama	Eligibilitas	Kontak dan Web link	Kesesuaian dalam Konteks Sumsel
Climate and Land Use Alliance and Ford Foundation	<p>Mitigasi Perubahan Iklim dan Peran masyarakat</p> <p>Climate Change Mitigation, REDD+, strengthening community rights over resources</p>	<p>Lembaga lokal yang fokus terhadap isu isu perubahan iklim dan penghidupan</p> <p>Local institution with main focus on climate change and livelihoods. Government institutions, and private sectors</p>	<p>Climate and Land Use Alliance 235 Montgomery Street, 13th Floor San Francisco, California 94104 tel +1 415.433.0566 fax +1 415.398.2327 , info@climateandlandusealliance.org http://www.climateandlandusealliance.org/initiatives/indonesia/</p>	<p>South Sumatra in general, specifically in <u>peatswamp</u> and <u>lowland forest</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyuasin • Musi Banyuasin • Musi Rawas • Musi Rawas Utara
DFID/MFP – Department for International Development/Multi stakeholder Forestry Program	<p>Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Livelihood, Konflik lahan</p> <p>Empowerment of Forest Management Unit (FMUs), Community Livelihoods, Tenurial conflict</p>	<p>Konsorsium NGO dan universitas.</p> <p>NGO consortium and universities</p>	<p>Gedung Manggala Wanabhakti Blok.7, Lt. 6 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270, tlp. +62215737094 Email: mfp@mfp.or.id atau nurhayati@mfp.or.id. Dipo Business Center UnitB, Lt. 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 50-52 Jakarta 10260 Tlp. +622129866400-1 Fax. +622129866402 http://www.mfp.or.id/index.php/id/peluang/hibah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Musi Rawas • Musi Banyuasin
FFI. Flora Fauna International	<p>Perlindungan Harimau Sumatra di Taman Nasional Kerinci Seblat</p> <p>Sumatra Tiger Protection in (National Park Kerinci Seblat)</p>	<p>Konsorsium dan/atau LSM lokal yang bekerja di Sumsel dan berpengalaman dengan isu perlindungan harimau</p> <p>Consortium and/or local NGO working in South Sumatra and has experience in</p>	<p>http://www.fauna-flora.org/</p> <p>PIC : Debbie Martyr</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Musi Rawas (Eq. TNKS)

		tiger protection		
ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund)	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Climate Change Adaptation and Mitigation. Land and Forest Fire Prevention	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), perguruan tinggi/universitas, lembaga penelitian, serta lembaga riset non-pemerintah, pemerintah setempat NGO, local community groups/KSM – <i>Kelompok Swadaya Masyarakat</i> , university, research centre, and non-government research centre, local government	Wisma Bakrie 2 Building, 20th floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B---2, Jakarta 12920, Indonesia Tel: +62 21 57945760, Fax: +62 21 57945759, Email: sgp@icctf.or.id http://icctf.or.id/	South Sumatra in general <ul style="list-style-type: none"> • Banyuasin (Mangrove) • Musi Banyuasin (Peatswamp and Lowland Forest) • Musi Rawas (Lowland Forest) • Musi Rawas Utara (Mountain Forest)
PT.Rimba Hutani Mas (CSR Program)	Konservasi Buaya Senyolong di Sungai Merang, Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir kab. MUBA Crocodile Conservation (Senyolong) in Merang river and Muara Medak village. Bayung Lencir Subdistrict	Dapat dikembangkan oleh NGO yang bergerak dibidang konservasi di Kabupaten Musi Banyuasin atau tingkat Propinsi NGO with focus issue on conservation in Musi Banyuasin District or in Province Level, especially in wildlife conservation	http://www.sinarmasforestry.com/Default.asp Office PT RHM: Marsda Iswahyudi Irg. Bajuri No. 1 PO BOX 147 Jambi 36135 Kontak : Abdullah (PT. RHM) hp. 081366892642 Paisal (LSM Bakau) hp. 081366598666	Musi Banyuasin Peatswamp forest (Eq.Kepayang or the village around : Muara Medak, Muara Merang)
PT.MEDCO E&P Limau (CSR Program)	Konservasi in-situ melalui program hutan asuh dengan melakukan rehabilitasi lahan SM Dangku seluas 30 Ha selama 2 tahun In situ conservation through 'program hutan asuh'/foster forest	Dapat dikembangkan oleh NGO yang bergerak dibidang konservasi di Kabupaten Musi Banyuasin atau tingkat Propinsi. NGO with focus issue on conservation in Musi Banyuasin District or in Province	Office Medco E&P Indonesia: Gedung Perkantoran Bidakara Lt. 12-17 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1-73 Jakarta12870 (telp./fax: 021-83991010/021-83991011 http://medcopower.co.id/node/50	Musi Banyuasin Lowland Forest (Eq. SM Dangku)

	program by rehabilitation of SM Dangku. 30 hectares in 2 years	Level	Office BKSDA Sumsel: Jl. Kol. H. Burlian KM 6 Palembang PIC; Sdr. Sabil (staff BKSDA Sumsel) hp. 085381399513	
RAN. Rainforest Action Network (Protect An Acre)	Konservasi dan advokasi hak-hak masyarakat Conservation and advocacy of community's rights	NGO dan komunitas yang berkerja langsung untuk Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan Hutan di Indonesia. NGO and community working on local community who settle around the forest area	Lafcadio Cortesi : L.cortesi@ran.org http://www.ran.org/	South Sumatra
RAMSAR Small Grants Fund for Wetland Conservation and Wise Use (SGF)	Konservasi dan livelihood daerah RAMSAR Conservation and community livelihoods in RAMSAR area	NGO dan Universitas. Sumsel (Berbak Sembilang) adalah wilayah RAMSAR. NGO and University	http://www.ramsar.org/sgf/key_ex.htm	Banyuasin Mangrove (Berbak Sembilang)
RSPB – Royal Society for Protection of Birds	Konservasi habitat burung Conservation of birds habitat	Eligible untuk NGO dan Universitas, termasuk Individu. Wilayah proyek di Musi Banyuasin dan Banyuasin. NGO and universities, including individual whose interest is in protecting bird's habitat	http://www.rspb.org.uk/international/conservation/asiagrants.asp e-mail : ian.barber@rspb.org.uk	<ul style="list-style-type: none"> • Banyuasin (mangrove) • Musi Banyuasin (peatswamp, lowland forest)
TAF. The Asia Foundation	Pengelolaan hutan dan lahan, penguatan kapasitas pemerintah Indonesia untuk menggunakan sumberdaya alam bagi yang membutuhkan (pro poor program) Land and forest management,	LSM local di Sumatera Selatan yang bekerja dengan fokus isu lingkungan dan hutan Local NGO in South Sumatera working on	http://asiafoundation.org/ Cobtact : PO BOX 6793 jakarta Telp. +62 727865. Fax. +62 727865 E-mail : indonesia.general@asiafoundation.org PIC : Alam Suryaputra :	<ul style="list-style-type: none"> • Lowland Forest (Eq. Musi Rawas, Musi Banyuasin) • Peatwsamp (Eq. Musi Banyuasin, OKI)

	strengthening Indonesian government to utilize the natural resources for people in need (pro poor program)	the issue of forest and environment	alam.suryaputra@asiafoundation.org	
TFCA/USAID Tropical Forest Conservation Act	Pengurangan Laju Degradasi dan Deforestasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Taman Nasional Sembilang (TNS) dan Lansekap TNKS Reduction of degradation and deforestation of land and forest in National Park Sembilang and Kerinci Seblat	<ol style="list-style-type: none"> 1. LSM bidang lingkungan, kehutanan dan konservasi. 2. Kelompok Masyarakat lokal dan organisasi yang didirikan dan beroperasi di Indonesia. 3. Lembaga lokal dari lembaga internasional atau regional yang memenuhi syarat dan atau aktif di Indonesia. 4. Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. NGO with focus issue on environment, forestry, and conservation 2. Local community and independent organization in Indonesia 3. Local institutions from international and regional foundation which fulfil the requirement and actively working in Indonesia 4. University 	Office TFCA : Jl. Bangka VIII no. 3B, Pela Mampang Jakarta 12720 INDONESIA Tel: +(62--21) 7199953; 7199962 Fax: +(62--21) 7196530 Email: tfcasumatera@tfcasumatera.org https://www.usaid.gov/biodiversity/TFCA TFCA Sumatera PIC: Dwi Pujiyanto Manager Hibah TFCA Sumatera) hp. 081297963974 http://www.tfcasumatera.org/	Banyuasin Mangrove ecosystem (Eq. TN Sembilang) Musi Rawas and Musi Rawas Utara Mountain Forest (Eq. TN Kerinci Seblat)
UNDP – United Nation Development Program	Penghitungan, lingkungan, bencana alam, penguatan hak masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Tahun 2016–2017, UNDP fokus pada isu kebakaran dan	NGO, pemerintah dan universitas. Untuk wilayah Sumsel	http://www.id.undp.org/	South Sumatra

	<p>penghidupan</p> <p>Livelihoods, environment, disaster, community rights, education and health. In 2016 – 2017, UNDP focuses on forest fire and livelihoods</p>	<p>NGO, government and universities</p>		
UK AID	<p>Restorasi lanskap, sinergi dengan perencanaan di tingkat provinsi untuk program “Desa Peduli Api” untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan</p> <p>Landscape restoration, synergizing with provincial planning on ‘Desa Peduli Api’ for land and forest fire prevention</p>	<p>Memungkinkan untuk mengajukan proposal bersama, konsorsium.</p> <p>Consortium, a collective proposal</p>	<p>Postal address: Postbox 19219. 3501 DE Utrecht The Netherlands. Phone: +31 (0)30 230 5660 Email: office@idhsustainabletrade.com http://www.idhsustainabletrade.com/</p> <p>Kantor ZSL Indonesia: Jl. Papandayan No. 18 Kel. Babakan Bogor 16151 Telp 0251 8356488 / 8339222 Fax 251 8339666 https://www.zsl.org/</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Banyuasin Mangrove (eq. TN Sembilang) • Musi Banyuasin Lowland forest (Eq. SM Dangku)
Yayasan Belantara	<p>Konservasi, restorasi dan livelihood diwilayah kerja Asia Pulp dan Paper</p> <p>Conservation, Restoration and Livelihood (especially in the area of Asia Pulp and Paper)</p>	<p>Layak diajukan oleh NGO dan universitas yang bekerja ditingkat tapak, masyarakat local yang bekerja dengan integrasi : perlindungan, restorasi dan ekonomi (peningkatan pendapatan)</p> <p>NGO who is working on the grass root level, local community group focusing on integrated issue : protection, restoration, economy</p>	<p>Contact : Dolly Priatna (dolly_priatna@app.co.id) and DR. Najib Asmani http://belantarafoundation.org/</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Banyuasin • Musi Banyuasin (Eq. Dangku Landscape) • OKI (Eq. Landscape Padang Sugihan)

Tautan Lainnya dan/atau sumber-sumber pendanaan lain:

1. Kerjasama Billateral (dua negara)/ Billateral Cooperation

- DANIDA. Denmark. <http://um.dk/en/danida-en/>
- JICA. Japan International Cooperation Agency. <http://www.jica.go.jp/english/>
- NORAD. The Norwegia Agency for Development Cooperation. <http://um.dk/en/danida-en/>

2. Lembaga keuangan/Financial Institutions

- ADB. Asian Development Bank. <http://www.adb.org>
- World Bank. <http://www.worldbank.org>

3. Yayasan/Foundation

- Bill and melinda gates Foundation. <http://www.gatesfoundation.org/>
- Gordon and Betty More Foundation. <https://www.moore.org/>
- JMG Foundation. www.jmgfoundation.org
- Leonardo Di Caprio Foundation. <http://leonardodicaprio.org/>
- Mc. Arthur Foundation. <https://www.macfound.org/>
- NEF. Nagao Natural Environment Foundation. <http://www.nagaofoundation.or.jp/e/index.html>
- The Rockefeller Foundation. <https://www.rockefellerfoundation.org/>
- Walton Family Foundation. <http://www.waltonfamilyfoundation.org/>

4. Lainnya

- CEPF. Critical Ecosystem Partnership Fund. <http://www.cepf.net/Pages/default.aspx>
- CGIAR Fund. <http://www.cgiar.org/who-we-are/cgiar-fund/>
- European Union. Environment Program. http://europa.eu/pol/env/index_en.htm
- GEF. Global Environment Facility. <https://www.thegef.org/gef/>
- HiVOS international. South East Asia Program (including Indonesia). https://sea.hivos.org/?_ga=1.50334506.2004547381.1464152498
- KEHATI. Biodiversity Conservation Tust Fund. <http://kehati.or.id/en>
- USFS. United State Forest Service. <http://www.fs.fed.us/>
- US Fish and Wildlife Service. <http://www.fws.gov/>
- Siemenpuu. <http://www.siemenuu.org/en>

PELUANG PENDANAAN DALAM BENTUK PINJAMAN

Selain skema grant/ bantuan, memungkinkan juga untuk mendapatkan pendanaan dengan skema bantuan, terutama untuk masyarakat melalui koperasi atau lembaga pendamping setelah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Program ini di fasilitasi oleh Badan Layanan Umum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu program Pembiayaan Hutan Tanaman. Ini dapat diakses melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) atau Koperasi.

Skim Dana Pinjaman HTR

- IUPHHK – HTR.
- Pola: Mandiri, Kemitraan, Developer.
- Lama izin maks 60 th, dapat diperpanjang 35 th.
- Luas: tiap Kepala keluarga maks 15 Ha, dibentuk KTH (Minimal 5 pemegang IUPHHK HTR) → 1 kelompok dibuat 1 akad kredit.
- Luas: 1 unit koperasi sesuai kemampuan usaha.
- Standar biaya HTR → dibagi 4 rayon (Rp. 5,5 – 8,3 juta/ha untuk biaya penanaman dan pemeliharaan).
- Bunga sesuai LPS (yang berlaku pada saat akad kredit), Grace Periode maks 8 tahun, tergantung jenis tanaman pokok.
- Resiko pinjaman → tanggung renteng & tanaman yang di tanam.

Syarat Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Koperasi untuk HTR

Syarat KTH :

- Kumpulan individu yg tinggal didalam dan atau di sekitar hutan
- Bukti : surat keterangan domisili dari Kepala Desa
- Anggota minimal 5 IUPHHK HTR, seluruhnya ingin meminjam, tiap izin minimal 8 Hektar
- Dokumen kelompok
- SK Penunjukkan Pendampingan

Syarat Koperasi (UMKM) :

- Dibentuk di sekitar hutan
- Pengurus & anggota bertempat tinggal di sekitar hutan
- Berbidang usaha kehutanan

Standar Biaya HTR

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Satuan	Biaya Satuan HTR menurut Rayon (Rp/Ha)			
			I	II	III	IV
I. KOMPONEN BIAYA BUKAN PINJAMAN						
A.	PERENCANAAN	Ha	415.000	415.000	415.000	415.000
B.	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA	Ha	100.000	112.500	141.000	194.000
C.	KEWAJIBAN KEPADA NEGARA	Ha	-	-	-	-
Jumlah I			515.000	527.500	556.000	609.000
II. KOMPONEN BIAYA PINJAMAN DANA BERGULIR SEBAGAI MODAL KERJA						
A.	PENANAMAN (Pengadaan bibit, Persiapan Lahan, Penanaman)	Ha	3.612.000	4.174.300	4.725.300	5.332.300
B.	PEMELIHARAAN (Pemeliharaan I-III, Pemeliharaan Lanjutan I-II)	Ha	1.734.250	2.094.000	2.443.000	2.796.300
C.	PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN (Pengendalian Hama dan Penyakit)	Ha	195.400	203.300	211.300	219.200
Jumlah II			5.541.650	6.471.600	7.379.600	8.347.800
III. KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPINJAM A TAU TIDAK SEBAGAI DANA BERGULIR						
Kewajiban Kepada Lingkungan		Ha	-	-	-	-
TOTAL I + II + III			6.056.650	6.999.100	7.935.600	8.956.800

Rayon I : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung
 Rayon II : Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
 Rayon III : Kalimantan Timur, Riau, NAD, Kep. Riau, Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat
 Rayon IV : Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur

59

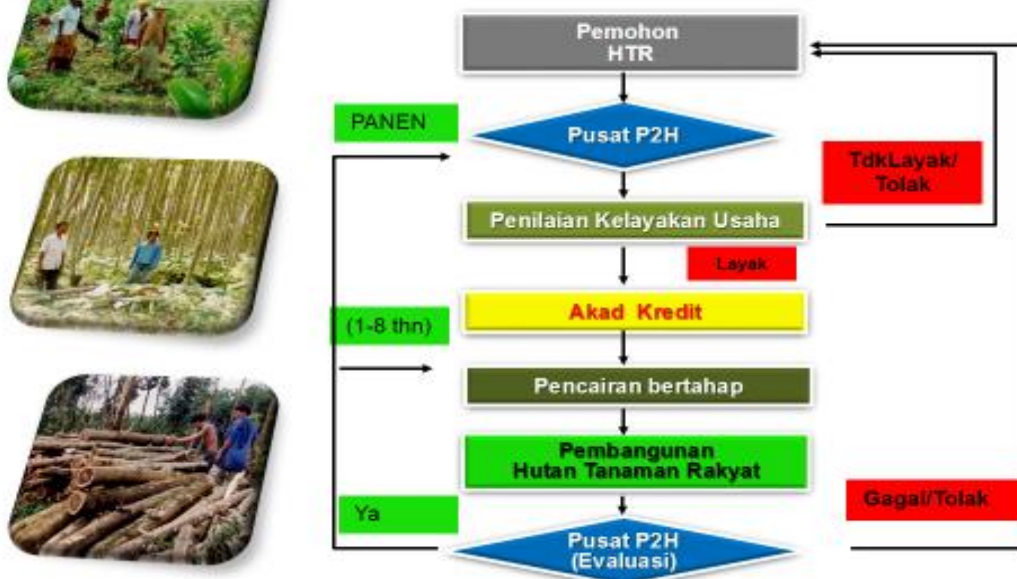
MEKANISME KERJA PUSAT P2H



Pengelolaan Dana Bergulir



MEKANISME PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN UNTUK HTR OLEH KOPERASI DAN KELOMPOK TANI



TANTANGAN MENDAPATKAN PENDANAAN DI LANDSKAP PRIORITAS

1. Kapasitas organisasi

Kapasitas organisasi, utamanya organisasi di daerah memang menjadi isu yang kerap menjadi tantangan tersendiri dalam mengakses dana hibah. Beberapa lembaga donor, kerap kali menyampaikan kesulitan mereka dalam mencari mitra yang memenuhi kriteria pendanaan mereka. Persoalan tersebut mulai dari hal-hal remeh seperti kelengkapan organisasi sampai masalah akuntabilitas. Isu tersebut juga didapati pada waktu diskusi dengan beberapa organisasi masyarakat sipil di Musi Banyuasin, Banyuasin dan Musi Rawas. Ada puluhan organisasi yang teridentifikasi, di Musi Banyuasin ada sekitar 7 CSO dan Banyuasin 12 CSO namun semua memiliki persoalan kapasitas. Isu kapasitas yang didapati di hampir semua organisasi adalah akuntabilitas. Walaupun dengan level yang berbeda-beda. Untuk sebuah organisasi bisa dikatakan memenuhi kriteria akuntabilitas maka organisasi tersebut harus mempunyai sistem yang bisa dipertanggungjawabkan terkait keuangan dan pelaksanaan proyek. Yang paling banyak masih mengalami kendala adalah mengenai pengelolaan keuangan.

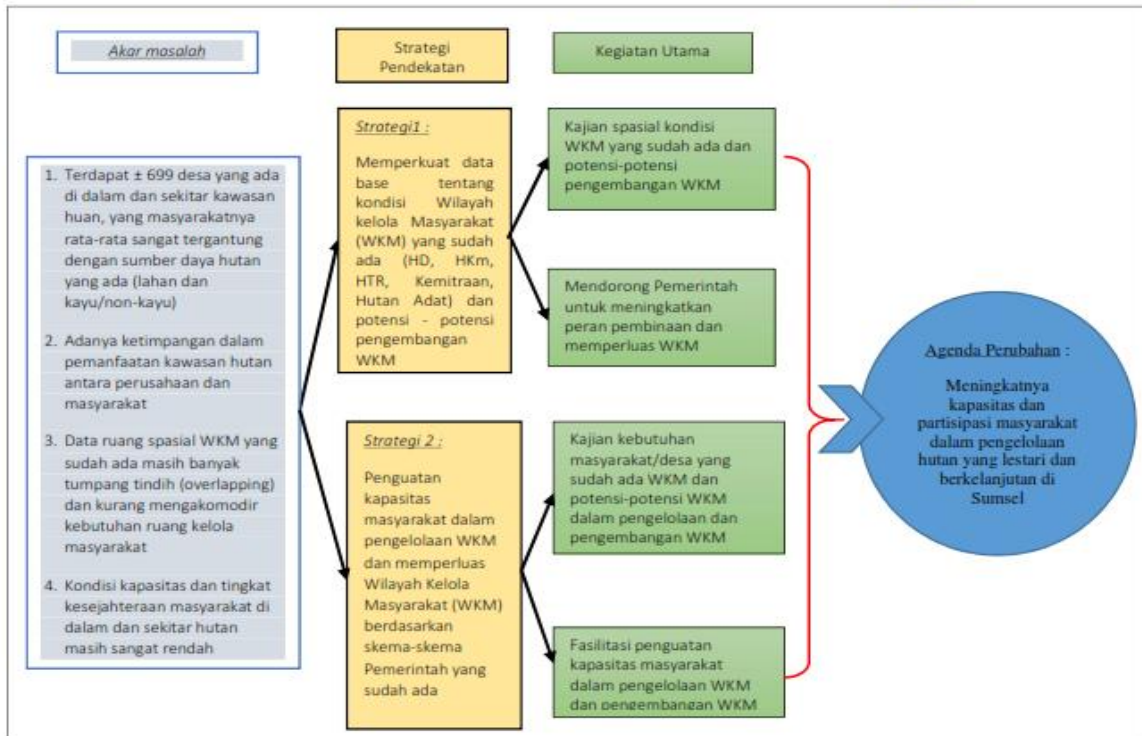
Isu kapasitas lainnya adalah terkait dengan sumber daya manusia. Banyak organisasi yang dari jumlah personel sebenarnya layak, namun soal kemampuan dalam mengelola sebuah proyek, dan pemahaman terkait isu-isu, misal terkait pengelolaan sumber daya alam masih merupakan sebuah kelemahan. Kebanyakan organisasi ini bergerak dalam bidang pemantauan pelaksanaan infrastruktur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dari perusahaan melalui program CSR. Terkadang mereka juga melaksanakan kegiatan untuk partai politik atau calon tertentu pada musim Pilkada atau Pemilu.

2. Kemampuan dalam pengembangan proposal atau project design

Desain sebuah project adalah kunci dari bagaimana proyek tersebut akan dilaksanakan dan pembiayaan seperti apa yang dibutuhkan. Untuk mengembangkan sebuah proyek, kita harus mampu untuk membaca dan memahami isu atau masalah yang akan kita intervensi, dan tindakan seperti apa yang dapat kita lakukan. Termasuk kita mengukur kekuatan organisasi kita dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk kita memahami dan mendesain isu tersebut dalam daftar tindakan yang dibutuhkan. Saat ini beberapa organisasi menggunakan metode Theory of Change (ToC) dimana dengan metode ini, kita merumuskan perubahan apa yang kita cita-citakan dari proyek kita, dan kegiatan apa yang dapat kita lakukan. Untuk melakukan ini kita juga terlebih dahulu harus melakukan analisis situasi dalam sebuah wilayah, dan juga analisis power atau biasa disebut SWOT.

Dalam banyak organisasi di Sumsel, kemampuan ini masih perlu peningkatan. Sehingga perlu dilakukan pelatihan terkait project design.

Contoh Theory of Change, HaKI, 2015.



3. Kerja sama antar lembaga

Tidak ada satu masalah yang bisa diselesaikan dengan satu pendekatan, tapi selalu dengan *multi approaches*, begitupula dengan isu sumber daya alam. Ada pendekatan konfrontatif dan kolaboratif, di mana tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pendekatan konfrontatif membuat pesan perubahan tidak dipahami secara utuh oleh pihak yang menjadi target perubahan. Sebaliknya, hanya pendekatan kolaboratif membuat perubahan berjalan sangat lamban. Maka kedua pendekatan itu perlu dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, tetapi memang akan sulit untuk dikerjakan oleh satu organisasi. Maka kerja sama antara organisasi itu dibutuhkan, termasuk dengan organisasi pemerintah.

Kerja sama antar lembaga tentu ada dinamikanya, terutama terkait kepentingan dan eksistensi organisasi. Organisasi besar biasanya dalam konteks *public communication* akan lebih mendominasi. Selain itu, perbedaan kapasitas masing-masing organisasi, dalam beberapa kasus menyebabkan sebuah aliansi atau konsorsium bubar ditengah jalan. Sehingga aliansi yang dibangun kemudian menjadi kontraproduktif. Namun hal tersebut dapat dicegah jika semua isu tersebut dibicarakan sejak awal, dan pembagian peran antar pihak jelas dari awal.

Di Sumatera Selatan, isu kerja sama antar organisasi juga masih sulit untuk diimplementasikan padahal ada banyak persoalan yang bisa dicarikan solusinya secara bersama-sama, misal soal kebakaran hutan yang terkait dengan isu kebijakan, ekonomi, dan penegakan hukum. Penanganannya memerlukan peran berbagai pihak.

KESIMPULAN REKOMENDASI

1. Beberapa donor potensial yang tertarik dengan isu Sumber Daya Alam dan Pengentasan Kemiskinan di Sumsel, khususnya di empat Kabupaten (Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin dan Banyuasin). Untuk di Wilayah Musi Rawas, donor lebih banyak tertarik ke isu perubahan iklim, biodiversity dan community rights seperti DANIDA, GIZ, USAID dan Ford Foundation. Perubahan iklim meliputi upaya-upaya adaptasi dan mitigasi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim. Sementara untuk isu community rights, kegiatan yang menjadi perhatian adalah terkait dengan ruang kelola masyarakat terhadap sumber daya alam meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Adat.
2. Di Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, masih banyak daerah yang bisa menjadi target perluasan ruang kelola masyarakat. Ini terlihat masih banyaknya desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yaitu 37 Desa di MURA dan 33 Desa di MURATARA (*HaKI, 2015*). Desa-desa inilah yang kemudian dapat dikembangkan menjadi wilayah-wilayah kelola masyarakat.
3. Khusus di Musi Banyuasin, ada beberapa organisasi yang paska kebakaran hutan 2015, sangat tertarik untuk memberikan bantuan pendanaan dan peningkatan kapasitas NGO, Pemerintah dan Masyarakat terdampak untuk mencegah kebakaran hutan pada tahun-tahun mendatang, seperti UNDP, ICCTF dan CLUA.
4. Dalam asesmen ini ditemukan ada banyak organisasi yang secara legalitas belum lengkap, terutama izin dari Menkum HAM, untuk itu agar semua organisasi tersebut didampingi untuk melengkapi syarat-syarat legalitasnya. Selain terkait isu legality, 95% dari CSO di Sumatera Selatan belum mempunyai rencana kerja yang jelas, yang dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang organisasi.
5. Untuk mengajukan proposal ke donor-donor menengah dan besar sebaiknya dilakukan dengan membentuk konsorsium sehingga masing-masing pihak dapat bekerja dan berperan sesuai dengan kapasitasnya. Organisasi yang secara kapasitas paling siap kemudian dapat ditunjuk menjadi host. Strategi ini sebaiknya ditempuh untuk mengurangi beban masing-masing organisasi dan sekaligus pembelajaran bersama bagi anggota konsorsium.
6. Penting untuk dilakukan pelatihan proyek design atau pembuatan proposal bagi NGOs dan stakeholder lain di Sumsel. Selanjutnya penting untuk mereka difasilitasi untuk berkomunikasi dengan lembaga pemberi dana melalui sebuah workshop peluang pendanaan bagi masyarakat sipil.

BAHAN BACAAN

Balai Tanaman Nasional Sembilang. (tanpa tahun): bahan presentasi pengelolaan di Zonasi TN Sembilang.

Kustiawan. Deny, Implementasi Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, Persentase KLHK 2015 di Bogor.

Hutan Kita Institute (HaKI), Contoh-contoh proposal 2016.

Machfudh, Mengakses dana hibah dan pembiayaan lain dari lembaga donor potensial di Indonesia, 2010

Page, S.E., S. Siegert, J.O. Rieley, H-D.V. Boehm, A. Jaya, S.H. Limin. 2002.

The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997, *Nature*, 420: 61-65.

Silalahi, M and T. A. Walsh. 2015. Hutan Harapan : Restoring Forest for Future Needs, Burung Indonesia, RSPB dan Hutan Harapan, Bogor

http://warsi.or.id/projects/tfca_ind.php.

LAMPIRAN 1. CONTOH LOGICAL FRAME WORK

LOGICAL FRAMEWORK ANALISYS (LFA)

Judul Proyek : Pengembangan dan Pendampingan Wilayah Kelola Masyarakat (WKM) pada kawasan hutan
 Lokasi : di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Empat kabupaten (kab. Banyuasin, MUBA, MURA, MURATARA)
 Priode kegiatan : 8 (delapan) bulan

	Indikator	Kegiatan/Sub-kegiatan
Goals : Terwujudnya pengelolaan dan perluasan Wilayah Kelola Masyarakat (WKM) di Sumatera Selatan yang lestari dan berkelanjutan		
Output 1 : Memperkuat data base tentang kondisi spasial Wilayah Kelola Masyarakat (WKM) yang sudah ada (HD, HKm, HTR, Kemitraan, Hutan Adat) dan potensi-potensi pengembangan WKM di masa datang	1.1. Dokumen hasil kajian spasial WKM yang sudah ada dan potensi-potensi pengembangan WKM	1.1. Kajian spasial WKM yang sudah ada dan potensi-potensi pengembangan WKM
	1.1.1. Dokumen hasil kajian spasial WKM tentang permasalahan spasial WKM yang sudah ada dan potensi-potensi pengembangan WKM di Sumatera Selatan	1.1.1. Kajian spasial tentang permasalahan spasial WKM yang sudah ada dan potensi-potensi pengembangan WKM di Sumatera Selatan
	1.1.2. Dokumen laporan hasil ground check tentang kondisi eksisting permasalahan spasial WKM yang sudah ada dan potensi-potensi pengembangan WKM	1.1.2. Ground check lapangan tentang kondisi spasial WKM yang sudah ada dan potensi-potensi pengembangan WKM
	1.2. Meningkatkan peran serta para pihak dalam penyelesaian masalah dan pengembangan WKM di prov. Sumsel	1.2. Mendorong Pemerintah dan para-pihak untuk meningkatkan peran pembinaan dan pengembangan WKM
	1.2.1. Terlaksananya SEMILOKA dua hari yang menghasilkan strategi dan peran bersama para-pihak dalam penyelesaian masalah spasial WKM yang sudah ada dan pengembangan WKM baru	1.2.1. Seminar dan lokakarya tingkat provinsi Sumsel tentang permasalahan WKM dan potensi-potensi pengembangannya

Output 2 : Penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan WKM dan memperluas Wilayah Kelola Masyarakat (WKM) berdasarkan skema-skema Pemerintah yang sudah ada	<i>2.1. Adanya dokumen hasil kajian kebutuhan pembinaan/pengembangan kapasitas terhadap WKM yang sudah ada dan potensial pengembangan WKM</i>	<i>2.1. Kajian kebutuhan masyarakat/desa yang sudah ada WKM dan potensi-potensi WKM dalam pengelolaan dan pengembangan WKM</i>
	2.1.1. Adanya dokumen hasil kajian lapang tentang kebutuhan pembinaan lembaga pengelola WKM pada 6 lokasi WKM yang sudah ada di kab.MURA	2.1.1. Kajian lapang tentang perkembangan dan kebutuhan pembinaan WKM yang sudah ada
	2.1.2. Adanya dokumen hasil kajian lapang tentang kebutuhan pembinaan masyarakat/desa pada sepuluh desa/lokasi potensial pengembangan WKM di kab. MURA, MURATARA, Banyausin dan MUBA	2.1.2. Kajian lapang tentang kebutuhan pembinaan masyarakat/desa pada lokasi-lokasi potensial pengembangan WKM
	<i>2. 2.Meningkatnya kapasitas dan keahlian perwakilan WKM yang sudah ada dan perwakilan masyarakat/desa potensial pengembangan WKM</i>	<i>2.2. Fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan WKM dan pengembangan WKM</i>
	2.2.1. Terlatihnya perwakilan pengurus HD dan HKm (masing-masing tiga orang) di kab. MURA dan MUBA dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada masing-masing WKM	2.2.1. Pelatihan pengelolaan HD dan HKm bagi WKM yang sudah ada
	2.2.2. Minimal sepuluh desa yang diwakili masing-masing tiga orang telah terlatih untuk mengusulkan dan mendorong pengelolaan WKM di masing-masing desa kab. MUBA, Banyuasin, MURA, dan MURATARA yang sesuai dengan skema yang dibutuhkan oleh masyarakat/desa	2.2.2. Pelatihan pengembangan WKM bagi masyarakat/desa yang potensial untuk diusulkan WKM dari skema-skema yang suda ada

LAMPIRAN 2 : ANALISA STAKEHOLDERS DALAM KEMAMPUAN MENGAkses PENDANAAN BERKAITAN DENGAN KONSERVASI HUTAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Analisa Stakeholders dalam kemampuan mengakses pendanaan berkaitan dengan konservasi hutan dan keanekaragaman hayati							
No.	Stakeholders	pemahaman terhadap isu lingkungan	pemahaman terhadap akses pendanaan (potensi donor)	kesiapan organisasi, networking	kemampuan menulis proposal, mengembangkan LFA, dll.	kelengkapan organisasi (legalitas, audit, dll)	Kontak Person
1	SKPD/ Kelompok Kerja tingkat provinsi Sumsel						
	BAPPEDA	Sudah sangat memahami isu-isu lingkungan di Sumsel terutama isu degradasi, deforestasi, dan kebakaran hutan/lahan	Cukup mengenal/ mengetahui potensi ² pendanaan dari lembaga-lembaga donor, namun belum mengetahui secara detail cara/startegi mengaksesnya	Secara organisasi kerjasama sudah sangat tersedia di Pemprov. Sumsel, namun akan sangat tergantung dengan kebijakan dan komitmen dari Kepala Daerah (Gubernur)	Sudah memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan pengembangan LFA, namun perlu ada penguatan kapasitas dalam hal proses & strategi kerjasama dengan donor bagi lembaga Pemerintah	Biasanya MoU dan surat kerjasama antara pihak ke-tiga dengan pemerintah provinsi Sumsel yang langsung kepada Gubernur	Regina (Ka.UPTB Penataan Ruang BAPPEDA prov. Sumsel), Hp. 081367710789
	Dinas Kehutanan	Sudah sangat memahami isu-isu lingkungan di Sumsel terutama isu degradasi, deforestasi, dan kebakaran hutan/lahan	Hanya mengetahui saja ada potensi lembaga-lembaga donor, namun cara/strategi mengaksesnya perlu ada pelatihannya		Kemampuan penulisan sudah cukup baik namun perlu ada penguatan dalam hal struktur penulisan yang standar Donor		Herwin, Hp. 082181852174

	Dinas Perkebunan	Isu pembangunan sawit berkelanjutan dan kebakaran hutan/lahan yang menjadi fokusnya	Hanya mengetahui informasi saja, bahwa banyak lembaga-lembaga donor yang dapat di akses namun cara/starteginya perlu di pelajari lagi		Kemampuan penulisan sudah cukup baik namun perlu ada penguatan dalam hal struktur penulisan yang standar Donor		Anung, Hp. 081367627924
	Forum Koordinasi pengelolaan DAS Sumsel	Sudah sangat memahami isu lingkungan, terutama isu kebakaran hutan/lahan dan penelolaan landsap DAS	Telah mengenal/mengetahui potensi-potensi pendanaan dari lembaga donor untuk pengelolaan SDA, namun perlu ada pendalaman materi tentang cara atau strategi mengaksesnya	Kesiapan organisasi dan jaringan sudah cukup lengkap dan siap	Sudah memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan pengembangan LFA, namun perlu ada penguatan kapasitas dalam hal proses & strategi kerjasama dengan donor bagi lembaga berbentuk forum yang dilegalitas/SK-nya oleh Gubernur	Legalitas yang ada: Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Prov. Sumsel	Syafrul Yunardi (Ketua Forum), Hp. 082133221147
	Forum CSO untuk Penanggulangan KARLAHUT Sumsel	Isu Kebakaran hutan/lahan dengan fokus pada pencegahan KARLAHUT yang berbasis masyarakat	Sudah mengenal/mengetahui beberapa lembaga donor yang dapat diakses, namun untuk memperluas potensi pendanaan ini perlu ada pendalaman materinya	Kesiapan organisasi dan jaringan sudah cukup lengkap dan siap	Kemampuan penulisan sudah cukup baik namun perlu ada penguatan dalam hal struktur penulisan yang standar Donor	Legalitas yang ada: Surat Keputusan bersama pembentukan forum dari anggotanya	Paisal (Ketua Forum), hp. 081366598666
2	SKPD/ Kelompok Kerja kabupaten MUBA						

BAPPEDA	Isu Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui penyusunan perencanaan pembangunan rendah emisi yang sedang dilakukan saat ini	Hanya mengetahui saja ada lembaga-lembaga donor sebagai potensi pendanaan, namun belum tahu tentang cara mengaksesnya	Akan sangat tergantung dengan kebijakan dan komitmen dari Kepala Daerah (Bupati)	Sudah memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan pengembangan LFA, namun perlu ada penguatan kapasitas dalam hal proses & strategi kerjasama dengan donor bagi lembaga Pemerintah	Biasanya MoU dan surat kerjasama antara pihak ke-tiga dengan pemerintah kabupaten yang langsung kepada Bupati	Yuwono Aries (Kabag Penataan ruang BAPPEDA Kab. MUBA)
Dinas Kehutanan	Cukup memahami tentang isu lingkungan, terutama isu degradasi dan deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, dan konflik pemanfaatan SDA/Hutan	Hanya mengetahui saja ada lembaga-lembaga donor sebagai potensi pendanaan, namun belum tahu tentang cara mengaksesnya		Kemampuan penulisan sudah cukup baik namun perlu ada penguatan dalam hal struktur penulisan yang standar Donor		Sumatro (Plt. Kadishut MUBA)
KPHP Lalan Mangsang Mendis	Isu degradasi dan deforestasi, Kebakaran hutan/lahan, dan Pengelolaan hutan berbasis masyarakat	Hanya mengetahui saja ada lembaga-lembaga donor sebagai potensi pendanaan, namun belum tahu tentang cara mengaksesnya	Sumber daya manusia (SDM) masih sangat terbatas, masih sangat tergantung dengan pembiayaan APBN(KLHK) dan APBD	Sudah memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan pengembangan LFA, namun perlu ada penguatan kapasitas dalam hal proses & strategi kerjasama dengan donor bagi SKPD (KPHP)		Amsyarudin, Hp. 081239490737
KPHP Meranti	Isu Degradasi dan deforestasi, kebakaran hutan/lahan, dan pengelolaan wilayah tertentu yang lestari dan berkelanjutan	Cukup mengetahui ada lembaga donor dan pembiayaan CSR yang dapat di akses	Sumber daya manusia (SDM) masih sangat terbatas, masih sangat tergantung dengan pembiayaan APBN(KLHK) dan APBD	Sudah memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan pengembangan LFA, namun perlu ada penguatan kapasitas dalam hal proses & strategi kerjasama dengan donor bagi SKPD		Wan kamil, Hp. 08127877762

					(KPHP)		
	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K)	isu membangun kesadaran masyarakat dan keterlibatannya dalam pengembangan/pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan pengembangan rencana bisnis (bisnis-plan) bambu	Mengetahui dan mengenal ada lembaga-lembaga donor yang berpotensi, namun belum pernah dicoba mengaksesnya	Jaringan sudah ada, dan untuk kerjasama akan sangat tergantung dengan kebijakan dan komitmen dari Kepala Daerah (Bupati)	Sudah memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan pengembangan LFA, namun perlu ada penguatan kapasitas dalam hal proses & strategi kerjasama dengan donor bagi lembaga Pemerintah		Tri Yulisman (Kabid Program Badan Penyuluhan Kab. MUBA), Hp. 085382733733
	Pokja Perencanaan Tata Guna Lahan mendukung Ekonomi Hijau dan Konservasi Biodiversitas	Sudah sangat memahami tentang isu perubahan iklim, yang saat ini sedang menyusun dokumen perencanaan pembangunan rendah emisi sektor hutan/lahan	Mengetahui dan mengenal ada lembaga-lembaga donor yang berpotensi, namun belum pernah dicoba mengaksesnya		Sudah memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan pengembangan LFA, namun perlu ada penguatan kapasitas dalam hal proses & strategi kerjasama dengan donor bagi lembaga berbentuk forum yang dilegalitas/SK-nya oleh Bupati	Legalitas yang ada: Surat Keputusan (SK) pembentukan POKJA dari Bupati	Agung, Hp. 082280131818
3	SKPD/ Kelompok Kerja Kabupaten Banyuasin						

BAPPEDA	Cukup memahami isu lingkungan, terutama isu perubahan iklim yang saat ini sedang menyusun dokumen perencanaan pemangunan rendah emisi di sektor huan/lahan	Hanya mengetahui saja banyak lembaga donor yang berpotensi untuk mendapatkan pendanaan, namun belum tahu cara mengaksesnya	Jaringan sudah ada, dan untuk kerjasama akan sangat tergantung dengan kebijakan dan komitmen dari Kepala Daerah (Bupati)	Belum memahami tentang penulisan proposal yang baik dan teknis pembuatan LFA yang standar donor	Biasanya MoU dan surat kerjasama antara pihak ke-tiga dengan pemerintah kabupaten yang langsung kepada Bupati	Khairul, Hp. 08127227520
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Isu degradasi dan deforestasi, kebakaran hutan/lahan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan	Hanya mengetahui saja banyak lembaga donor yang berpotensi untuk mendapatkan pendanaan, namun belum tahu cara mengaksesnya		Belum memahami tentang penulisan proposal yang baik dan teknis pembuatan LFA yang standar donor		Arif Budiman, Hp. 08127873029
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Cukup memahami isu lingkungan, yang mendorong para-pihak untuk berkontribusi dalam penurunan emisi dan pengembangan industri yang ramah lingkungan	cukup mengetahui ada lembaga donor dan pembiayaan CSR yang berpotensi, namun cara/strategi mengaksenya belum diketahui secara detail		Belum memahami tentang penulisan proposal yang baik dan teknis pembuatan LFA yang standar donor		Martini Yulia, Hp.081278450863
Dinas Perikanan dan Kelautan	Isu pengelolaan tambak yang ramah lingkungan (mis: sistem silvofisheri tambak di mangrove)	Mengetahui ada beberapa lembaga donor, namun belum tahu cara/strategi mengaksesnya		Belum memahami tentang penulisan proposal yang baik dan teknis pembuatan LFA yang standar donor		Syawalina, Hp. 081373455151

	Balai Taman Nasional Sembilang	Isu kebakaran hutan/lahan, Degradasi hutan, Membangun keterlibatan masyarakat, serta konservasi biodiversity	Mengetahui ada beberapa lembaga donor, namun belum tahu cara/strategi mengaksesnya	Jaringan pendanaan ada, namun untuk mengaksesnya perlu birokrasi dan tergantung kebijakan dari pusat (KLHK)	Sudah memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan pengembangan LFA, namun perlu ada penguatan kapasitas dalam hal proses & strategi kerjasama dengan donor bagi lembaga berbentuk UPT dari KLHK	Biasanya ada MoU dan surat kerjasama dari Kepala Balai TNS	Teguh Imansyah, Hp. 081368683488
	Pokja Perencanaan Tata Guna Lahan mendukung Ekonomi Hijau dan Konservasi Biodiversitas	Sudah cukup memahami tentan isu perubahan iklim, yang saat ini sedang menyusun dokumen perencanaan pembangunan rendah emisi sektor hutan/lahan	Mengetahui dan mengenal ada lembaga-lembaga donor yang berpotensi, namun belum pernah dicoba mengaksesnya	Jaringan sudah ada, dan untuk kerjasama akan sangat tergantung dengan kebijakan dan komitmen dari Kepala Daerah (Bupati)	Sudah memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan pengembangan LFA, namun perlu ada penguatan kapasitas dalam hal proses & strategi kerjasama dengan donor bagi lembaga berbentuk forum yang dilegalitas/SK-nya oleh Bupati	Legalitas yang ada: Surat Keputusan (SK) pembentukan POKJA dari Bupati	Khairul, Hp. 08127227520
4	SKPD/ Kelompok Kerja Kabupaten MURA/TARA						

BAPPEDA kab. MURA	Sudah cukup memahami isu lingkungan terutama isu perubahan iklim (Adaptasi & mitigasi)	Pemanfaatan pendanaan dari lembaga donor potensi besarnya adalah pihak Ketiga (NGOs, CSO, Akademisi), Pemerintah berperan sebagai pendukung dan penerima manfaat		Belum memahami tentang penulisan proposal yang baik dan teknis pembuatan LFA yang standar donor	Biasanya MoU dan surat kerjasama antara pihak ke-tiga dengan pemerintah kabupaten yang langsung kepada Bupati	Albi Putra (Kasubid Sumber Daya dan Investasi)
KPHP Lakitan	Isu degradasi dan deforestasi, membangun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan (kemitraan & Hutan Desa), dan konflik pengelolaan sumber Daya Hutan baik oleh masyarakat maupun perusahaan	Mengetahui banyak lembaga-lembaga donor yang berpotensi mendukung kegiatan KPHP, namun belum pernah di coba	Jaringan sudah ada, dan untuk pembiayaan-pembiayaan hibah kecil yang sifatnya sarana& prasarana (SAPRAS) dapat langsung dilakukan oleh KPHP	Belum memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan pengembangan LFA yang standar donor, dan juga perlu ada penguatan kapasitas dalam hal proses & strategi kerjasama dengan donor bagi SKPD (KPHP)		Edi Cahyono(Ka.KP HP Lakitan), hp. 081278959007
Balai Taman Nasional Kelinci Sebelat (TNKS) Wil. Sumsel	Kebakaran hutan dan lahan, Degradasi dan deforestasi, serta membangun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNKS	Pemanfaatan pendanaan dari lembaga donor potensi besarnya adalah pihak Ketiga (NGOs, CSO, Akademisi), TNKS berperan sebagai pendukung dan penerima manfaat	Jaringan sudah ada, dan untuk kerjasama akan sangat tergantung dengan kebijakan dan komitmen dari Kepala Daerah (Bupati)	Belum memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan pengembangan LFA yang standar donor, dan juga perlu ada penguatan kapasitas dalam hal proses & strategi kerjasama dengan donor bagi UPT di bawa KLHK	Biasanya ada MoU dan surat kerjasama dari Kepala Balai TNKS	Miskun (Kasi TNKS Wil. Sumsel), Hp. 085267866237

	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan kab. MURA	Belum cukup memahami tentang isu lingkungan, namun cukup berpotensi dalam mendorong perusahaan dalam kontribusinya pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR	Potensi pembiayaan yang telah dikenal adalah dari Perusahaan swasta (pembiayaan CSR), yang selama ini; pengajuannya langsung masyarakat ke perusahaan tersebut	Hanya berperan dalam mendorong perusahaan mengimplementasikan CSR-nya	Belum memahami tentang penulisan proposal yang baik dan teknis pembuatan LFA yang standar donor	Biasanya MoU dan surat kerjasama antara pihak ke-tiga dengan pemerintah kabupaten yang langsung kepada Bupati	Drs. Suwardi (Kabid Pengawasan dan Pengendalian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan kab. MURA
	Pokja REDD+ Kab. MURA	Sudah sangat memahami tentang isu lingkungan terutama isu perubahan iklim, yang sat ini sedang menyusun dokumen perencanaan rendah emisi sektor hutan dan lahan, serta menjadi tim inti dalam penyusunan KLHS RPJM kab. MURA	Cukup mengetahui banyak lembaga donor yang berpotensi mendukung pengelolaan SDA, namun pendanaan ini akan lebih flexible diajukan oleh pihak ketiga (NGOs, CSO, Akademisi)	Bagian dari kebijakan dari pusat (KLHK), dan untuk kerjasamanya akan sangat tergantung kebijakan dari pusat (KLHK)	Belum memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan pengembangan LFA yang standar donor, dan juga perlu ada penguatan kapasitas dalam hal proses & strategi kerjasama dengan donor bagi Forum yang legalitas/ SK-nya oleh Bupati		Edi Cahyono (Sekretaris POKJA REDD+), hp. 081278959007

	Forum CSR untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kab. MURA	Belum cukup memahami isu-isu lingkungan, namun berpotensi membangun kemitraan perusahaan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (hutan/lahan) misalnya: rehabilitasi hutan/lahan berbasis masyarakat dengan pembiayaan CSR	Pembiayaan donor dari perusahaan swasta (CSR) sebagai kewajibannya akan/telah berpotensi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan LH yanglestari dan berkelanjutan	Berperan dalam monitoring dan evaluasi implementasi dana CSR perusahaan kepada masyarakat	Belum memiliki kemampuan dalam penulisan proposal dan penyusunan LFA yang standar program yang terukur, sehingga dapat diimplementasikan oleh penerima manfaat dalam pengajuan pembiayaan CSR	Legalitas yang ada: Surat Keputusan (SK) pembentukan forum CSR dari Bupati	Drs. Suwardi (Kabid Pengawasan dan Pengendalian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan kab. MURA
5	LSM Lokal						
	Lembaga Pemantau Lingkungan Hidup (LPLH) Kab. MURA	Cukup memahami isu lingkungan terutama isu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan/lahan, Deforestasi dan degradasi di kab. MURA/MURATARA	Belum mengetahui ada banyak lembaga donor yang dapat diakses	Jaringan, sumber daya manusia di orgnaisasi masih sangat terbatas terbatas	Belum memahami tentang penulisan proposal yang baik dan teknis pembuatan LFA yang standar donor	Legalitas yang ada: 1. Notaris, 2. izin Kembanglinmas, 3. Audit (belum ada)	kenni, Hp. 081274924102
	Yayasan Adil Lestari Kab. MURA	Cukup memahami isu lingkungan terutama konflik perusahaan HTI dengan masyarakat, dan pengelolaan tambang yang tidak ramah lingkungan di kab. MURA/TARA	Mengetahui banyak lembaga donor, namun memiliki keterbatasan kapasitas untuk mengaksesnya	Jaringan, sumber daya manusia di orgnaisasi masih sangat terbatas terbatas	Belum memahami tentang penulisan proposal yang baik dan teknis pembuatan LFA yang standar donor	Legalitas yang ada: 1. Notaris, 2. izin Kembanglinmas, 3. Audit (belum ada)	Saparudin Yasa, Hp.

Komunitas Masyarakat Peduli Pembangunan MUBA Kab. MUBA	Cukup memahami isu-isu lingkungan terutama kerusakan hutan, banjir, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan	Mengetahui banyak lembaga donor, namun memiliki keterbatasan kapasitas untuk mengaksesnya	Jaringan, sumber daya manusia di organisasi masih sangat terbatas	Belum memahami tentang penulisan proposal yang baik dan teknis pembuatan LFA yang standar donor	Legalitas yang ada: 1. surat pembentukan forum dari anggota, 2. izin Kembanglinmas, 3. Audit (belum ada)	Saparudin, Hp. 08127391177
Komite Komunitas Demokrasi Banyuasin (KKDB) Kab. Banyuasin	cukup memahami isu lingkungan terutama yang berkaitan dengan kerusakan hutan/lahan dan sedang mendorong kebijakan desa/tata ruang desa yang berbasis konservasi	Mengetahui banyak lembaga donor, namun memiliki keterbatasan kapasitas/pengetahuan tentang cara/strategi untuk mengaksesnya	Jaringan, sumber daya manusia di organisasi masih sangat terbatas	Kemampuan dalam penulisan proposal dan penyusunan LFA yang standar Donor masih belum baik	Legalitas yang ada: 1. surat pembentukan forum dari anggota, 2. izin Kembanglinmas, 3. Audit (belum ada)	Arman Sakri, Hp. 081320116371
Hutan Kita Institute (HaKI) Sumsel	Sudah sangat memahami isu-isu lingkungan, dan telah fokus isu membangun pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HD/HKm), mendorong tata kelola hutan/lahan yang baik, dan resolusi konflik antara masyarakat dan perusahaan HTI, serta konservasi biodiversity di lanskap Sembilang	Mengetahui dan mengenal dengan baik banyak lembaga donor dan telah mengakses/mendapatkan beberapa pembiayaan dari lembaga donor	Jaringan, sumber daya manusia, dan kesiapan organisasi sudah sangat siap	Penulisan proposal dan penyusunan LFA yang standar donor sudah cukup baik	Legalitas organisasi: 1. Notaris ada, 2. Izin Kemenkumham ada, 3. izin Kembanglinmas ada, 4. Audit (belum ada)	Aidil Fitri, Hp. 08127110385

Lingkar Hijau (LH) - Sumsel	sudah cukup memahami isu lingkungan terutama isu pengelolaan hutan/lahan berbasis masyarakat, dan konflik pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), yang saat ini sedang mendorong PHBM di kab. MUBA	Mengetahui dan mengenal dengan baik banyak lembaga donor dan telah mengakses/mendapatkan beberapa pembiayaan dari lembaga donor	Jaringan sudah ada, namun SDM organisasi masih terbatas	Kemampuan dalam penulisan proposal dan penyusunan LFA yang standar Donor masih belum baik	Legalitas organisasi: 1. Notaris ada, 2. Izin Kemenkumham ada, 3. izin Kembanglinmas ada, 4. Audit (belum ada)	Anwar sadad, Hp. 08127855725
Perkumpulan Tanah Air (PeTA) - Sumsel	sudah cukup memahami isu lingkungan, terutama tata kelola SDA, Agraria, dan kajian kebijakan SDA	Mengetahui banyak lembaga donor, namun memiliki keterbatasan kapasitas/pengetahuan tentang cara/strategi untuk mengaksesnya	Jaringan sudah ada, namun SDM organisasi masih terbatas	Kemampuan dalam penulisan proposal dan penyusunan LFA yang standar Donor masih belum baik	Legalitas organisasi: 1. Notaris ada, 2. Izin Kemenkumham ada, 3. izin Kembanglinmas ada, 4. Audit (belum ada)	Muhaimin, hp. 085100750367
Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Desa (KEMASDA)	Sudah cukup paham tentang isu lingkungan, sudah fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat di sekitar hutan dan pengembangan usaha produktif masyarakat yang ramah lingkungan	Mengetahui dan mengenal dengan baik banyak lembaga donor dan telah mengakses/mendapatkan beberapa pembiayaan dari lembaga donor	Jaringan sudah cukup luas, dan SDM organisasi cukup tersedia	Penulisan proposal dan penyusunan LFA yang standar donor sudah cukup baik	Legalitas organisasi: 1. Notaris ada, 2. Izin Kemenkumham ada, 3. izin Kembanglinmas ada, 4. Audit ada	Nurnajati, hp. 081532765663

	SPORA Institute - Sumsel	sudah cukup memahami isu lingkungan, terutama tata kelola konflik SDA dan pengembangan pertanian organik	Mengetahui dan mengenal dengan baik banyak lembaga donor dan telah mengakses/mendapatkan beberapa pembiayaan dari lembaga donor	Jaringan sudah ada, namun SDM organisasi masih terbatas	Kemampuan dalam penulisan proposal dan penyusunan LFA yang standar Donor masih belum baik	Legalitas organisasi: 1. Notaris ada, 2. Izin Kemenkumham ada, 3. izin Kembanglinmas ada, 4. Audit (belum ada)	Julian Junaidi (polong), hp. 082176144440
6	Akademisi/ Universitas						
	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniyah Kab. MUBA	Sudah cukup memahami isu lingkungan terutama perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi)	Belum mengetahui tentang potensi lembaga-lembaga donor yang dapat di akses	Jaringan masih terbatas, ada organisasi LPPM (lembaga penelitian dan pengabdian Masyarakat) yang berpoensi untuk kerjasamanya	Kemampuan dalam penulisan proposal dan penyusunan LFA yang standar Donor masih belum baik dan perlu dikuatkan kapasitas ini	Legalitas organisasi: 1. Notaris ada, 2. Izin perguruan tinggi ada, 2. izin Kembanglinmas ada, 3. Audit ada	Ahmad Irfansyah
	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Bumi Silampari Lubuk linggau	Belum memahami secara komprehensif isu-isu lingkungan, namun sudah mulai dalam membangun kesadaran masyarakat untuk keterlibatannya dalam pelestarian LH	Belum mengetahui tentang potensi lembaga-lembaga donor yang dapat di akses	Jaringan masih terbatas, ada organisasi PUSLIT & PPM yang berpoensi untuk kerjasamanya	Kemampuan dalam penulisan proposal dan penyusunan LFA yang standar Donor masih belum baik	Legalitas organisasi: 1. Notaris ada, 2. Izin perguruan tinggi ada, 3. izin Kembanglinmas ada, 4. Audit ada	Imanudin, Hp. 081373116456
	Fakultas MIPA Jurusan Biologi UNSRI	Sudah sangat memahami tentang isu-isu lingkungan, dan sedang melakukan kegiatan penyusunan database biodiversity lanskap sembilang	Mengetahu banyak tentang lembaga-lembaga donor dan telah mengakses dan mendapatkan pembiayaan dari lembaga tersebut	Jaringan sudah cukup luas, dan secara organisasi telah dan siap bekerjasama dengan lembaga/donor	Kemampuan dalam penulisan proposal dan penyusunan LFA yang standar Donor masih belum baik	Legalitas organisasi: 1. Notaris ada, 2. Izin perguruan tinggi ada, 3. Audit ada	Indra Yustian, Hp. 081271260812
7	Pelaku Usaha						

PT Rimba Hutani Mas (Hutan Tanaman Industri - Sinar Mas Forestry Group) Kab. MUBA	Cukup memahami isu lingkungan terutama isu pengamanan hutan, konservasi buaya senyulong, dan pemberdayaan masyarakat sekitar konsesi-nya	Telah berperan sebagai donor melalui dana CSR-nya untuk konservasi Buaya Senyulong dan Pembinaan ekonomi masyarakat desa di sekitar konsesinya	Jaringan sudah cukup luas, dan sudah memiliki devisi khusus untuk implementasi pembiayaan CSR	belum ada standar/format khusus proposal bagi masyarakat yang mengajukan pembiayaan CSR, sehingga perlu ada penguatan kapasitas dalam hal penyusunan standar/format proposal yang terukur	Legalitas standar perusahaan yang mendapatkan izin dari Pemerintah	Abdullah Bakri, hp. 081366892642
PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI)	Sangat memahami isu lingkungan, fokus restorasi ekosistem di konsesinya di kab. MUBA dan Jambi	Mengetahu banyak tentang lembaga-lembaga donor dan telah mengakses dan mendapatkan pembiayaan dari lembaga tersebut	Jaringan sudah sangat luas, dan sudah ada kelembagaan konsorsium dan Yayasan KEHI yang dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga donor dan atau implemntasi pembiayaan CSR-nya	Penulisan proposal dan penyusunan LFA yang standar donor sudah sangat baik	Legalitas standar perusahaan yang mendapatkan izin dari Pemerintah	Firdaus, Hp. 085838139518
PT. MEDCO E & P Indonesia Kab. MURA	Belum memahami secara komprehensif tentang isu-isu lingkungan, kemitraan dengan masyarakat melalui dana CSR-nya berpotensi dalam pengelolaan lingkungan (hutan/lahan) yang lestari dan berkelanjutan	Telah berperan sebagai donor melalui dana CSR-nya untuk Pembinaan ekonomi masyarakat desa di sekitar izinya	Jaringan tingkat lokal sudah cukup luas, dan memiliki devisi khusus untuk implementasi pembiayaan CSR bagi masyarakat sekitar izin-nya	belum ada standar/format khusus proposal bagi masyarakat yang mengajukan pembiayaan CSR, sehingga perlu ada penguatan kapasitas dalam hal penyusunan standar/format proposal yang terukur	Legalitas standar perusahaan yang mendapatkan izin dari Pemerintah	

LAMPIRAN 3 : CONTOH SWOT DI KECAMATAN TANJUNG LAGO, KABUPATEN BANYUASIN

<p style="text-align: center;">UNSUR INTERNAL</p> <p>UNSUR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik Lahan sesuai untuk Tanaman Pangan 2. Kondisi Saluran yang Sudah Baik 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kooperatif 4. Pekerjaan Utama Masyarakat Adalah Petani 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya inkonsistensi Tata Ruang 2005 - 2015 2. Kondisi Bangunan Drainase Kurang Berfungsi 3. Keberadaan P3A tidak berperan aktif 4. Tidak adanya Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Drainase
<p style="text-align: center;">Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah Tentang Pentingnya Penataan Ruang 2. UU.No.32 Tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah 3. Lahan Pangan diakomodasi lebih besar pada RTRW 2012-2032 4. Permintaan Terhadap Pemanfaatan Lahan Yang Tinggi. 	<p style="text-align: center;">Strategi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan kawasan andalan melalui penentuan alokasi pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaian lahan dan RTRW. ➤ Pemanfaatan ruang dengan memanfaatkan semangat otonomi daerah, sarana, prasarana dan dukungan perundangundangan ➤ Pemanfaatan Ruang dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat ➤ Permintaan terhadap lahan disesuaikan dengan pekerjaan utama petani. 	<p style="text-align: center;">Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perubahan tata ruang disesuaikan dengan kondisi aktual lahan ➤ Pemanfaatan sumberdaya lokal dengan memanfaatkan peran aktif masyarakat ➤ Komitmen pemerintah terhadap pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Ancaman (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan Mengoptimalkan Rencana Tata Ruang Mengikuti Pertumbuhan Sektoral Dan Permintaan Pasar 2. Alih fungsi ke tanaman sawit sangat besar 3. Konflik antar kegiatan/sector dalam pemanfaatan lahan 4. Ego sektoral dan daerah semakin kuat terkait dengan otonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan rencana pengelolaan berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan untuk menghindari terjadinya konflik antar kegiatan / sector dan tekanan terhadap sumber daya alam yang berlebihan ➤ Pemanfaatan ruang dengan berpedomann pada kesesuaian lahan dan tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan koordinasi antar sector dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang untuk mengurangi konflik dan tekanan terhadap sumberdaya alam

Published by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Kantor Terdaftar
Bonn dan Eshborn, Jerman

BIOCLIME
Biodiversity and Climate Change

Kantor Jakarta:
GIZ ICCTF/GE LAMA I
Gedung Wisma Bakrie II. 5th Floor Ruang ICCTF
Jl. HR Rasuna Said Kavling B-2
Jakarta Selatan 12920
Tel.: +62-21-9796 7613
Fax.: +62-21-5794 5739

Kantor Palembang :
Jl. Jend. Sudirman No. 2837
KM. 3,5 Palembang
Tel.: +62-711-353176
Fax.: +62-711-353176

Penulis : Aidil Fitri, Mangarah Silalahi, Adiosyafri, Deddy Permana, Nyimas Wardah

Photo credits :Bioclime
I www.bioclimate.org
E bioclimate@giz.de
FB Bioclime